

**TALANGAN BIAYA UMROH MELALUI JASA KEUANGAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus pada PT. Federal International Finance Kotabumi Lampung Utara)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh :

**NIZAMI ALI
NPM. 1421030220**

Program Studi : Mu'amalah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

**TALANGAN BIAYA UMROH MELALUI JASA KEUANGAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus pada PT. Federal International Finance Kotabumi Lampung Utara)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

Nama : Nizami Ali

Npm : 1421030220

Program Studi : Mu'amalah

Pembimbing I : H. Rohmat,S.Ag., M.H.I.

Pembimbing II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

Banyak aspek kerjasama semata-mata bertakwa kepada Allah bekal untuk akhirat. Salah satu bentuk kerjasama yang umum di masyarakat adalah jasa talangan umroh yang bisa dijadikan suatu usaha yang menguntungkan atau sering disebut juga cicilan umroh sangat diperlukan buat kaum muslim yang memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan ibadah umroh namun mereka terbatas dengan kondisi keuangannya artinya mereka bisa berangkat umroh akan tetapi bayarnya dengan cara diangsur atau dicicil melalui jasa keuangan di antaranya PT. FIF (*Federal International Finance*).

Dalam hal ini, penulis akan mencoba menganalisis akad *qardh wal ijarah* yang dipakai PT. FIF (*Federal International Finance*) untuk mengurus seluruh proses pembiayaan talangan umroh.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik akad talangan biaya umroh di perusahaan FIF (*Federal International Finance*), bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad biaya talangan umroh di perusahaan FIF (*Federal International Finance*). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akad talangan biaya umroh di perusahaan FIF (*Federal International Finance*), untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap akad biaya talangan umroh di PT. FIF (*Federal International Finance*).

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif yaitu menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan kemudian hasilnya dapat memecahkan persoalan kasus

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan praktik akad talangan pembiayaan umroh melalui jasa keuangan PT. FIF Kotabumi tentang dana talangan umroh dengan menggunakan akad *Qardh Wal Ijarah*. Dalam pelaksanaannya praktik pembiayaan talangan umroh di PT. FIF (AMITRA) mendapatkan keuntungan *ujrah* dengan melihat jangka waktu pelunasan nasabah bukan mendapatkan dari upah/jasa administrasi yang diberikan PT. FIF kepada para nasabah. Pandangan hukum Islam tentang akad talangan pembiayaan umroh melalui jasa keuangan PT. FIF Kotabumi menggunakan akad *Qardh Wal Ijarah* dilihat dari pelaksanaan akad tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN No: 29/DSN-MUI/VI/2002 atau ketentuan hukum Islam rentan mengandung unsur *riba*.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703531, 780421

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : NIZAMI ALI

NPM : 1421030220

Program Studi : Muamalah

Fakultas : Syariah

**Judul Skripsi : Talangan Biaya Umroh Melalui Jasa Keuangan
Perspektif Hukum Islam. (Studi Kasus pada PT.
Federal International Finance Kotabumi Lampung
Utara)**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197409202003121003**

Pembimbing II

**Abdul Qodir Zaenani, S.H.I., M.A.
NIP. 198206262009011015**

Ketua Jurusan

**Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703531, 780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Talangan Biaya Umroh Melalui Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam. (Studi Kasus pada PT. Federal International Finance Kotabumi Lampung Utara)** disusun oleh **Nizami Ali NPM 1421030220** Program Studi Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: 17 Juni 2019

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M. M (.....)

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy. (.....)

Penguji I : Dr. H. Khairuddin, M.H (.....)

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197009011997031002

MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah [9] :105)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2012) h .204

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas hidayah-Nya, skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT, atas segala rahmat kesehatan dan kemampuan yang telah diberikan-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibuku tercinta Nursiah dan Bapakku Tercinta Rodji'i, atas segala pengorbanan, senantiasa selalu mendoakan dalam setiap waktunya, dan selalu memberikan dukungan moril dan materil, serta curahan kasih sayang yang tak terhingga. Semoga kelak nanti dapat membanggakan untuk kalian, dan keluarga yang lainnya, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kalian di dunia dan diakhirat
3. Kakakku Tersayang Moch.Fahru Rozi dan Anggun, Octa Liestia Pratiwi dan Adhar serta Paman ku tersayang Idaman Warga atas segala doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Nizami Ali dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 20 Februari 1997, anak ketiga dari tiga bersaudara, buah cinta kasih dari pasangan Rodji'i dan Nursiah.

Menempuh Pendidikan dimulai dari :

1. Pendidikan Dasar (MIN) Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Blambangan, Kotabumi, lulus pada tahun 2008.
2. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada SMPN 1 Abung Selatan Kotabumi, lulus pada tahun 2011.
3. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada SMAN 4 Kotabumi, lulus pada tahun 2014.
4. Pada tahun 2014 meneruskan jenjang pendidikan strata satu (S1) di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah pada Jurusan Muamalah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga terlimpah dan tumpahrukan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir jaman, amiiin.

Penulisan ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah jurusan Muamalah di UIN Raden Intan Lampung, judul yang disusun yaitu “ **TALANGAN BIAYA UMROH MELALUI JASA KEUANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**”. (Studi Kasus pada PT. Federal International Finance Kotabumi Lampung Utara).

Dalam menyusun dan menulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan senang hati menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

2. Dr. H.A. Khumaidi Ja'far, S.Ag.,M.H, selaku ketua Jurusan Muamalah yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi.
3. H. Rohmat, S.Ag., M.H.I selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi, dan Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi.
4. Seluruh dosen yang pernah mengajar dan memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung dan Perpustakaan Fakultas Syariah, yang telah membantu berupa buku untuk penulisan skripsi.
6. PT. Federal International Finance Kotabumi Lampung Utara, selaku tempat penelitian skripsi, yang telah memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi.
7. Teman terdekatku Maya Kuswara Nunyai, S.Pd yang selalu memberikan semangat serta dukungan yang tiada henti membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku Brudul Squad, Shintya Utami,,S.Pd atas segala semangat dan doa yang telah diberikan.
9. Teman-teman seperjuangan Muamalah 2014, Khususnya kelas Muamalah D atas dukungan serta semangat yang saling diberikan satu sama lain, sehingga dapat saling membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, karena keterbatasan. Untuk perbaikan selanjutnya,

saran dan kritik yang membangun akan diterima dengan senang hati. Akhirnya kepada Allah SWT akan serahkan segalanya mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk pembaca, khususnya dalam bidang ke Islaman.

Bandar Lampung, 23 Mei 2019

Penulis,

Nizami Ali

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2

C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Umroh.....	13
1. Rukun Umroh	14
2. Wajib dan Sunnah Umroh.....	20
3. Syarat Umroh	21
4. Dasar Hukum Umroh.	22
B. Pengertian <i>Ijārah</i>	25
1. Landasan Hukum Akad <i>Ijārah</i>	31
2. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i>	34
C. Pengertian.....	36
1. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	37
2. Rukun dan Syarat-syarat Akad <i>Qardh</i>	38
3. Fatwa DSN Tentang <i>Qardh Wal Ijarah</i>	45

BAB III PENYAJIAN DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1. Sejarah PT. FIF Kotabumi	49
2. Visi dan Misi PT. FIF Kotabumi.....	50
3. Struktur Organisasi.....	50
B. Praktik Produk Pembiayaan Talangan Umroh PT. FIF Kotabumi.....	55

BAB IV ANALISIS DATA

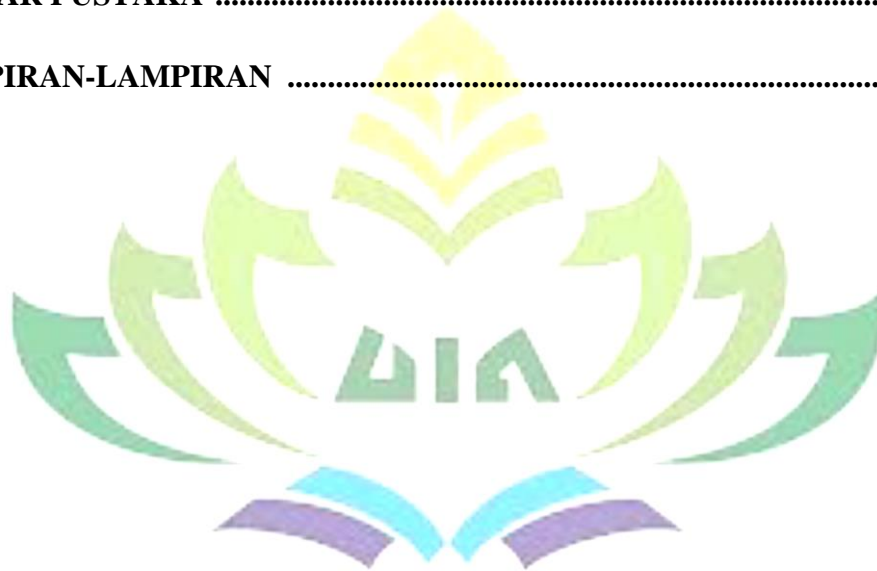
A. Praktik Akad Talangan Pembiayaan Umroh Melalui Jasa Keuangan PT. FIF Kotabumi.....	77
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Akad Talangan Biaya Umroh Melalui Jasa Keuangan PT. FIF Kotabumi	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam makna yang terkandung dalam judul, maka penulis memerlukan adanya pembatasan arti kalimat dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“TALANGAN BIAYA UMROH MELALUI JASA KEUANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**. (Studi Kasus pada PT. Federal International Finance Kotabumi Lampung Utara). Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut :

1. “Talangan adalah dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu.”²
2. Biaya adalah aliran dana atau sumber daya yang dihitung dalam satuan moneter yang dikeluarkan guna memenuhi pengeluaran perusahaan.³
3. Umroh adalah mengunjungi Ka’bah untuk melaksanakan serangkaian ibadah (*tawaf, sa’i, dan tahallul*) dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an maupun sunnah Rasulullah SAW.⁴

² Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 468.

³Heri Sudarsono, *Istilah Istilah Bank & Lembaga Keuangan Syari’ah* (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 111.

⁴A. Solihin As Suhaili, *Kitab Super Lengkap Tuntunan Haji dan Umroh* (Jakarta: Cahaya Ilmu, 2015), hlm. 45.

4. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar yang sebagaimana terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya) serta sudut pandang.⁵
5. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁶
6. PT. Federal International Finance (FIF) adalah jasa keuangan dan perusahaan pembiayaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Astra. Bisnis FIF awalnya difokuskan pada pembiayaan konvensional dan syariah untuk mendukung penjualan ritel sepeda motor Honda.⁷

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem pembiayaan talangan umroh yang dilakukan di perusahaan FIF (*Federal International Finance*).

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini adalah:

1. Secara Objektif

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan talangan umroh yang dilakukan oleh pihak nasabah dan jasa keuangan PT. FIF (*Federal International Finance*) di Kotabumi.

⁵Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op. Cit*, hlm. 1062.

⁶Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 6.

⁷<https://www.astra.co.id/Business/Financial-Services/Motorcycle-Financing/FIFGROUP>

- b. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai biaya umroh yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan yang bersifat tiba.

2. Secara Subjektif

- a. Penelitian ini merupakan salah satu permasalahan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang menyusun pelajari di bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Permasalahan ini belum pernah dibahas dalam judul skripsi tahun sebelumnya, khususnya di Fakultas Syari'ah.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas akan tetapi alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas mendorong manusia untuk selalu berusaha mencari sumber kebutuhan. Apabila manusia hanya mengandalkan dirinya sendiri, tentulah pemenuhan kebutuhan tidak akan terwujud, dengan demikian manusia harus saling tolong-menolong dan saling bertukar keperluan melalui kerjasama atau sesuai dengan hukum-hukum seperti firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدُوٰنِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة : ٢)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang g-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”.⁸(Q.S Al-Maidah : 2)

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia membutuhkan manusia yang lain dalam menjalankan kehidupan, maka tidak dapat dipungkiri akan terjadi kerjasama dalam mencapai sebuah tujuan. Banyak aspek kerjasama di atas semata-mata bertakwa kepada Allah bekal untuk akhirat. Salah satu bentuk kerjasama yang umum di masyarakat adalah jasa talangan umroh yang bisa dijadikan suatu usaha yang menguntungkan, misalnya dana talangan umroh atau sering disebut juga cicilan umroh sangat diperlukan buat kaum muslim yang memilki keinginan kuat untuk melaksanakan ibadah umroh namun

⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid & Terjemah* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010).

mereka terbatas dengan kondisi keuangannya artinya mereka bisa berangkat umroh namun bayarnya dengan cara diangsur atau dicicil melalui jasa keuangan di antaranya PT. FIF (*Federal International Finance*).

Realisasi ekonomi dalam upaya menerapkan tujuan pembangunan nasional sebagai bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam pengembangan sistem ekonomi yang sesuai dengan syari'ah pada berbagai lembaga jasa keuangan. Sebagai perusahaan pembiayaan pertama yang memiliki platform Syariah, PT. FIF (*Federal International Finance*), telah memberangkatkan ratusan jamaah ke tanah suci untuk mengikuti perjalanan ibadah umroh, baik umroh regular maupun umroh plus sesuai dengan akad syariah yang sudah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah. Akad yang digunakan dalam produk talangan umroh adalah *Qardh wal ijārah*, yang mana akad ini merupakan gabungan dari dua akad sekaligus, yaitu *Qardh* (Pembiayaan/talangan) dan *ijārah* (Sewa) dalam hal ini sewa yang dimaksud dalam akad *ijārah* adalah sewa atau bisa disebut *ujrah* (upah).⁹

Upah dalam Islam masuk juga ke dalam *ijārah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa *ijārah* berarti "upah" atau "ganti" atau imbalan, karena itu lafadz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas,¹⁰ maka dari itu nasabah tetap dimintai *ujrah*, sebagai pengganti biaya jasa keuangan PT. FIF (*Federal International*

⁹Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah* (Padang: Hayfa Press, 2005), hlm. 96.

¹⁰Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 30.

Finance) untuk mengurus seluruh proses pendaftaran umroh berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya. Sementara telah diketahui bersama bahwa *ujrah* adalah representasi dari akad *Ijārah*. Pembiayaan pada produk talangan umroh dilaksanakan guna memenuhi permintaan pasar yang sedang berkembang.

Dalam pelaksanaan obyek talangan biaya umroh pada jasa keuangan (FIF) di Kotabumi menunjukkan jika uang muka (*Down Payment*) yang diberikan kepada pihak jasa keuangan FIF kecil maka angsuran yang diberikan dari pihak jasa FIF akan tergantung pada nasabah dalam lama pelunasan. Semakin lama nasabah mengambil angsuran maka keuntungan (*provit*) yang diperoleh pihak jasa keuangan akan besar begitupun sebaliknya.¹¹

Dari latar belakang diatas, penulis ingin memaparkan permasalahan tersebut dengan judul **“Talangan Biaya Umroh Melalui Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam”**. (Studi Kasus pada FIF Kotabumi Lampung Utara).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis simpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik akad *Qardh wal ijārah* terhadap talangan biaya umroh di perusahaan FIF (*Federal International Finance*) ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad biaya talangan umroh di perusahaan FIF (*Federal International Finance*) ?

¹¹Putri Auliana, wawancara dengan penulis, PT.FIF, Kotabumi, 20 Juli 2018

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui akad talangan biaya umroh di perusahaan FIF (*Federal International Finance*).
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap akad biaya talangan umroh di PT. FIF (*Federal International Finance*).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Agar masyarakat mengetahui tentang hukum talangan umroh yang mengandung unsur riba.
- b. Agar masyarakat mengetahui praktik pembiayaan talangan umroh yang dilakukan oleh PT. FIF (*Federal International Finance*).
- c. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹² Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke PT. FIF Group cabang Lampung Utara untuk melakukan wawancara dengan pihak perusahaan yang sudah

¹²Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet VII (Bandung : CV. Mandar Maju, 1996), hlm. 81.

memberikan jasa talangan biaya umroh ini sebagai tempat penelitian. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.¹³ Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah mendeskripsikan praktik pembiayaan talangan umroh yang dilakukan oleh PT. FIF (*Federal International Finance*).

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri. Dalam hal ini peneliti memperoleh secara langsung data dari para pihak PT. FIF (*Federal International Finance*) dan masyarakat yang menggunakan talangan umroh di PT. FIF (*Federal International Finance*) cabang Kotabumi.
- b. Data Sekunder, yaitu kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.¹⁴ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kepustakaan, mbuku-buku maupun data-data tertulis yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

¹³*Ibid*, hlm. 112.

¹⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 83.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, dan media sebagainya.¹⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat FIF cabang kotabumi Lampung Utara yang melakukan Talangan Biaya Umroh melalui Jasa Keuangan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih mengikuti prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi. Untuk menentukan ukuran bila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Menurut Arikunto, apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semuanya, namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.¹⁶ Oleh karena itu, pada penelitian ini diperoleh jumlah nasabah dan karyawan PT. FIF sebanyak 100 orang. Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 10% dari jumlah populasi maka sampel yang di peroleh pada penelitian ini berjumlah 15 orang (Putri Auliana, Roganda, Haidir,

¹⁵ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Edisi Revisi (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 111.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 113.

Khusnawati, Lili, Sugianto, Boti, Nasrun, Herman, Sumiati) yang seluruhnya akan dijadikan sampel sebagai bahan dari penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Seorang peneliti harus dapat memilih dan menentukan metode yang tepat dan mungkin dilaksanakan (*feasible*) guna mencapai tujuan penelitiannya. Karena itu, seorang peneliti perlu mengenal berbagai metode ilmiah dan karakteristiknya. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan, yang dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti.¹⁷ Data yang peneliti dapat merupakan hasil wawancara peneliti kepada para pihak yang ikut serta dalam talangan umroh dan juga kepada pihak PT. FIF (*Federal International Finance*) cabang Kotabumi.

b. Dokumentasi

¹⁷Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya), hlm. 144.

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya¹⁸ yang berhubungan dengan praktik pembiayaan talangan umroh di PT. FIF (*Federal International Finance*).

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, peraturan dalam ilmu kedokteran, atau dokumen) pemegang hak cipta (nama penulis, tahun, penerbitan) atau urutan rumusan masalah (masalah A, masalah kedua B, dan seterusnya).
- c. Rekontruksi data (*rekontrucing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan.
- d. Sistematis data (*sistematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁹

¹⁸*Ibid.*, hlm. 147.

¹⁹Moh.Nazir, *Op Cit*, hlm. 122-123.

6. Teknik Menganalisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif yaitu menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan kemudian hasilnya dapat memecahkan persoalan kasus.²⁰



²⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004), hlm. 127.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Umroh

Umroh berasal dari bahasa Arab yaitu *i'tamara* berarti berkunjung atau ziarah. Kata ini juga berarti meramaikan tanah suci Mekah yang disitu terletak Masjidil Haram dan di dalamnya terdapat Ka'bah. Namun demikian, umroh dalam konteks ibadah tidak sekedar berarti meramaikan, melainkan lebih dari itu, yaitu orang melaksanakannya dituntut agar dapat mengambil manfaat dari umrohnya, karena sebagaimana haji, aktivitas umroh merupakan refleksi dari pengalaman hamba-hamba Allah, yaitu Ibrahim As. dan putranya Ismail as.²¹ Kata umroh dengan arti meramaikan sama maknanya dengan kata makmur diambil dari bahasa Arab *ma'mūr* dalam bahasa Indonesia. Kata makmur sendiri seakar dengan kata umroh. Kata ini bukan hanya berarti ramai, tetapi juga mengandung makna mensejahterakan atau membuat sejahtera. Dalam konteks ini, umrah bukan hanya sekedar meramaikan tempat-tempat suci yang dalam istilah al-Qur'an disebut dengan *syā'airillah* (monument-monumen Allah), yakni Ka'bah, makam Ibrahim, Shafa dan Marwah. Tetapi lebih jauh dari itu, menghormati monumen-monumen Allah itu sebagai cerminan takwa seseorang.²²

²¹H.Abdurachman Rochimi, *Segala Tentang Haji dan Umroh*, hlm.12

²²*Ibid*, hlm.13

Sedangkan menurut terminologi, umroh adalah sengaja berziarah ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan ibadah kepada Allah dengan cara-cara tertentu.²³

1. Rukun Umroh

Menurut ulama mazhab Māliki dan Hambalī, umroh mempunyai tiga rukun yaitu, *ihrām*, *tāwaf*, dan *sa'i* antara bukit Shafa dan Marwah. Sementara ulama mazhab Syāfi'i menambahkan dua rukun umroh lagi, sehingga keseluruhannya menjadi lima. Kelima rukun itu adalah *ihrām*, *tāwaf*, *sa'i*, mencukur atau memotong rambut dan tertib.

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, ulama mazhab Hanāfi menetapkan bahwa rukun umrah hanya satu, yaitu melakukan *tāwaf* mengelilingi Ka'bah sebanyak empat kali putaran. Sedangkan tiga putaran lagi dikelompokkan pada wajib umrah. Adapun *ihrām* merupakan syarat bagi umroh. Sementara *sa'i* dan mencukur atau memotong rambut termasuk wajib umrah. Rukun dalam ibadah umroh dibagi menjadi empat bagian yang mana tidak sah suatu ibadah umroh jika tidak mengerjakan rukun-rukun tersebut, rukun umroh antara lain :

- a. *ihrām*.
- b. *tāwaf*.
- c. *Sā'i*.
- d. Tahallul.

²³Said Agil Husin dan Al Munawar dan Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntut Jamaah Mencapai Haji Mabrur*, hlm.277-278.

a. *Ihrām*

Bagi orang yang hendak beribadah umroh, maka ia wajib melakukan *ihrām* karena hal tersebut bagian dari rukun umroh.

Kewajiban-kewajiban ihram, dalam *ihrām* ada tiga hal yang wajib dilakukan yaitu:²⁴

1) Niat

Tidak ada perbuatan yang dilakukan dengan sadar tanpa adanya niat. Niat sebagai motivasi dari perbuatan, dan niat merupakan hakikat dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain jika *berihram* dalam keadaan lupa atau main-main tanpa niat maka ihramnya batal.

2) *Talbiyah*

Lafadz *Talbiyah* adalah :

“Labbaikallaahumma labbaika, labbaika lāa syarīka laka labbaika, innal hamda wanni ’mata laka wal mulka lāa syarīka laka”.

Waktu membaca *talbiyah* bagi orang yang berihram, dimulai dari waktu ihram dan disunnahkan untuk membaca terus sampai melempar jumrah `aqobah.

3) Memakai pakaian *ihrām*

Para ulama madzhab sepakat bahwa lelaki yang *ihrām* tidak boleh memakai pakaian yang terjahit, dan tidak pula kain sarung, juga tidak boleh memakai baju dan celana, dan tidak boleh pula yang menutupi kepala dan wajahnya. Kalau perempuan harus memakai

²⁴*Ibid*, hlm.282

penutup kepalanya, dan membuka wajahnya kecuali kalau takut dilihat lelaki dengan ragu-ragu. Perempuan tidak boleh memakai sarung tangan, tetapi boleh memakai sutera dan sepatu.

Para ulama madzhab sepakat bahwa lelaki yang *ihrām* tidak boleh memakai pakaian yang terjahit, dan tidak pula kain sarung, juga tidak boleh memakai baju dan celana, dan tidak boleh pula yang menutupi kepala dan wajahnya. Kalau perempuan harus memakai penutup kepalanya, dan membuka wajahnya kecuali kalau takut dilihat lelaki dengan ragu-ragu. Perempuan tidak boleh memakai sarung tangan, tetapi boleh memakai sutera dan sepatu.

Hal-hal yang disunnahkan pada waktu hendak *ihrām* :²⁵

- a) Membersihkan badan
- b) Memotong kuku
- c) Mencukur
- d) Melakukan salat *ihrām*
- e) Melebatkan rambut
- f) Memakai wangi-wangian

Hal-hal yang dilarang dalam *ihrām*:

- a) Kawin
- b) Bersetubuh
- c) Memakai wangi-wangian
- d) Bercelak
- e) Memotong kuku
- f) Memotong Rambut
- g) Menebang Pohon
- h) Melihat dirinya dalam cermin

²⁵ *Ibid*, hlm. 292

- i) Memakai Pacar
- j) Memakai Payung
- k) Berbuat kefasikan dan bertengkar

b. *Tawāf*

Tāwaf merupakan salah satu dari rukun umrah yang wajib di laksanakan, adapun mengenai pembagiannya, ulama membagi menjadi tiga bagian, yaitu:²⁶

1) *Tawāf Qudum*

Tawāf ini dilakukan oleh orang-orang yang jauh(bukan orang mekkah dan sekitarnya) ketika memasuki mekkah, *tawāf* ini menyerupai solat dua rakaat tahiyat masjid. *Tawāf* ini hukumnya sunnah, dan yang meninggalkannya tidak dikenakan apa-apa.

2) *Tawāf Ziarah*

Tāwaf ini juga dinamakan *tawāf ifādhah*. *Tawāf* ini dilakukan oleh orang yang haji (bukan orang yang umrah) setelah melaksanakan *manasik* di Mina, dinamakan *tāwaf* ziarah karena meninggalkan Mina dan menziarahi *baitullah*. Tapi juga dinamakan *tāwaf ifādhah* karena ia telah kembali dari Mina ke Mekkah.

3) *Tāwaf Wadā'*

Tawāf ini merupakan perbuatan yang terakhir yang dilakukan oleh orang yang haji ketika hendak melakukan perjalanan meninggalkan Mekkah.

²⁶H. Abdurachman Rochimi, *Segala Tentang Haji dan Umroh*, hlm. 32

c. *Sā'i*

Ulama` sepakat bahwa *sā'i* dilakukan setelah *tawāf*. Orang yang melakukan *sā'i* sebelum *tawāf*. maka ia harus mengulangi lagi(ia harus *bertawāf*. kemudian melakukan *sā'i*).

Terdapat hal-hal yang disunnahkan bagi orang yang sedang melakukan *sā'i* diantaranya :

- 1) Disunnahkan menaiki bukit Shafa dan Marwah serta berdo`a diatas kedua bukit tersebut sekehendak hatinya, baik masalah agama maupun dalam masalah dunia sambil menghadap ke *Baitullah*.
- 2) Melambaikan tangan ke Hajar Aswad
- 3) Minum air Zam-zam.
- 4) Menuangkan sebagian air ke tubuh.
- 5) Keluar dari pintu yang tidak berhadapan dengan Hajar Aswad
- 6) Naik ke bukit Shafa, menghadap ruknul *Iraqi*, berhenti lama di Shafa, dan bertakbir kepada Allah sebanyak tujuh kali.²⁷

Barang siapa yang tidak mampu melakukan *sā'i* walau dengan mengendarai kendaraan, maka hendaklah meminta orang untuk mewakilinya, dan hajinya tetap sah. Boleh menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang ketika pergi dan pulang(kembali).Orang yang menambah lebih tujuh kali dengan sengaja, maka *sā'i*-nya dianggap batal, tetapi tidak batal kalau lupa. Apabila ragu-ragu dalam jumlah maka *sā'i*-nya tetap dianggap sah, dan tidak diwajibkan sesuatu apa-apa baginya.

²⁷*Ibid*, hlm. 36.

Kalau ia ragu apakah memulai dari Shafa, yang berartisā`i-nya sah, atau mulai dari yang lain menjadikan sā`i-nya batal, maka hal ini perlu diperhatikan jika orang yang ragu tersebut dalam hal jumlah dan bilangan, tidak mengetahui berapa kali ia melakukannya makasā`i-nya batal. Tapi kalau ia benar-benar mengetahui berapa kali ia telah berjalan dan hanya ragu darimana ia memulai, maka kalau jumlah yang dilakukannya itu genap apakah dua kali, empat kali, atau enam kali dan ia sedang berada di Shafa atau sedang menghadap ke Shafa, maka sā`i-nya sah karena ia mengetahui bahwa ia telah memulai dari Shafa.²⁸

d. *Tahallul*

Menurut pendapat Imamiyah kalau orang yang melakukan umroh *Tamattu`* telah selesai ber-sā`i, ia harus menggunting rambutnya, namun tidak boleh mencukurnya. Bila ia telah memotongnya, maka apa yang diharamkan baginya telah menjadi halal. Tapi kalau telah mencukurnya, maka ia harus membayar *kifarah* berupa seekor kambing. Tapi kalau ber-umroh *Mufrodah*, maka ia boleh memilih antara menggunting atau mencukur, baik ia mengeluarkan kurban atau tidak.

Tetapi kalau meninggalkan menggunting rambut itu dengan sengaja sedangkan ia bertujuan untuk melakukan haji *tamattu`* dan ber-*ihrām* sebelum menggunting rambut, maka umrohnya batal. Ia wajib melakukan haji *ifrad*. Maksudnya melakukan amalan-amalan haji, kemudian

²⁸H. Abdurachman Rochimi, *Segala Tentang Haji dan Umroh*, hlm. 32

melakukan umrah mufradah setelah amalan-amalan haji itu. Dan lebih utama adalah mengulangi haji lagi pada tahun yang akan datang.

2. Wajib dan Sunnah Umroh²⁹

Semua yang wajib dalam haji adalah wajib pula dalam umroh. Demikian juga yang sunnah dalam umroh. Demikian juga yang sunnah dalam haji adalah sunnah dalam masalah *ihrām*, rukun-rukun, wajib-wajib, sunnah-sunnah, hal-hal yang haram dan makruh dilakukan dan yang membatalkan kecuali menurut pendapat Malikiyah.

Wajib umrah ada dua, yaitu :

- a. Ber-*ihrām* dari Miqat
- b. Menghindari dan menjauhi hal-hal yang diharamkan selama ber-*ihram*.

Sunnah umrah:

Berikut hal-hal yang disunnahkan kepada jamaah umroh

- a. Mandi sunnah sebelum ber-*ihrām*
- b. Salat sunnah *ihrām* sebanyak dua rakaat.
- c. Membaca *Talbiyah*, shalawat Nabi, dan doa.
- d. Mencium Hajar Aswad.
- e. Salat sunnah di Maqam Ibrahim
- f. Salat sunnah di Hijr Ismail.
- g. Berdoa di Multazam.
- h. Minum air Zam-zam.

²⁹Said Agil Husin AL Munawar, dan Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jamaah Mencapai Haji Mabrur*, Hlm. 285-286

3. Syarat Umroh

Secara umum, syarat-syarat haji dan umroh adalah sama, yaitu:

a. Islam

Orang (non muslim) di larang memasuki tanah suci. Jika dia berkunjung ke tanah suci bahkan mengikuti ibadah haji atau umrah seperti *tāwaf* dan *sā'i* maka perjalanan haji atau umrohnya hanya sebatas melancong saja.

b. Baligh

Anak kecil tidak diwajibkan berhaji atau pun umroh, baik yang sudah *Mumayyiz* maupun yang belum. Jika sudah *Mumayyiz* pelaksanaan haji atau umroh maka sah, tetapi pelaksanaan haji atau pun umroh yang sebelum *Mumayyiz* itu merupakan sunnah dan kewajiban melaksanakan haji atau pun umroh tidak gugur. Setelah baligh dan bisa atau mampu, ia wajib melaksanakan haji atau pun umroh lagi, menurut kesepakatan ulama mazhab.

c. Berakal sehat

Orang gila sebenarnya tidak mempunyai beban atau bukan seorang mukallaf. Jika para pelaksana ibadah haji atau umroh dapat melaksanakan kewajiban yang dilakukan oleh orang yang berakal, maka haji atau umrohnya itu tidak diberi pahala dari kewajiban itu, sekalipun pada waktu itu akal sehatnya sedang datang kepadanya. Tapi kalau gilanya itu musiman dan bisa sadar (sembuh) sekitar

pelaksanaan haji atau umroh, sampai melaksanakan kewajiban dan syarat-syaratnya dengan sempurna, maka dia wajib melaksanakannya.

d. Merdeka

Maksud dari merdeka ini adalah tidak berstatus sebagai budak (hamba sahaya di masa Rasulullah S.A.W yang di masa modern ini hampir tidak ditemukan di dunia). Istilah merdeka juga bisa diartikan bebas dari tanggungan hutang dan tanggungan nafkah keluarga yang ditinggalkan

e. *Istithā'ah* (mampu)

Secara sepakat para ulama mazhab menetapkan bisa atau mampu itu merupakan syarat kewajiban haji atau pun umroh.³⁰

4. Dasar Hukum Umroh

Para ulama Fikih sepakat bahwa ibadah haji dan umrah adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim yang mempunyai kemampuan biaya, fisik dan waktu, sesuai dengan nash Al-Qur'an:

.....فِيهِ ءَايَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ^ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ^ق وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ج وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ
الْعَالَمِينَ (الأعران ٩٧)

Artinya: *Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah*

³⁰Ibid, hlm. 290

Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.³¹ (QS. Al-Imran :97)

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٩٧﴾

Artinya: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya. (QS. Al-Baqarah : 15)

Kewajiban haji hanya sekali dalam seumur hidup, sedangkan haji berikutnya hukumnya sunah sabda Rasulullah SAW:

³¹Departemen Agama RI, *AL-Quran Tajwid & Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010)

أَلْحَبُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ (رواة : احمد, نسا, ابن ماجه)

Artinya : “Haji itu wajibnya hanya satu kali, dan selebihnya adalah *sunnah*”. (HR. Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah).³²

Apabila sudah memiliki bekal yang cukup untuk berangkat haji, segera berangkat menunaikannya karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Sabda nabi.

تَعَجَّلُوا إِلَاحُجَّ يَعْنِالْفَرِيضَةَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا تَدْرِي مَايَعْرِضُ لَهُ
(رواة: احمد)

Artinya : “Bersegeralah kamu menunaikan ibadah haji, yakni menunaikan kewajiban, maka sesungguhnya kamu tidak mengetahui sesuatu yang akan datang (yang akan terjadi)”. (HR. Ahmad).³³

Lebih dari itu, bagi orang yang sudah mampu tapi enggan berangkat menunaikan ibadah haji, maka baginya mati Yahudi atau Nasrani, sabda nabi.

مَلَكَ زَادَ وَرَاحِلَةً وَلَمْ يَحْجَّ بَيْتَ اللَّهِ فَلَا يَضُرُّهُ مَاتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا
(رواة: تارمزي)

³²Imam Abi Khusaini Muslim Bin Hajar Hajj'i Nisaburiy, *Sahih Bukhori no. 2195 dan Muslim no. 1552*.

³³Abdurahman Al-Jazairi, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), h.134

Artinya : “Barang siapa yang telah memiliki bekal dan kendaraan (sudah mampu), dan ia belum haji ke Baitullah maka tidak ada yang menghalangi baginya mati Yahudi atau Nasrani”. (HR. Tirmidzi).³⁴

B. Pengertian *Ijārah*

Sebelum mengetahui pengertian yang lebih dalam mengenai sebuah akad sewa menyewa/upah maka yang paling utama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah definisi mengenai akad itu sendiri, karena sewa menyewa atau *ijārah* adalah merupakan salah satu akad yang ada dalam muamalah. Dalam Islam setidaknya ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat.³⁵

Dikatakan seperti itu maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.³⁶ Proses perikatan yang telah disebutkan di atas tidak terlalu berbeda dengan proses perikatan yang diutarakan oleh Subekti yang didasarkan pada KUH Perdata. Subekti memberi pengertian perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

³⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillahtuhu*, Jilid 2, Penerjemah Abdul Hayyir al-Katani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

³⁵Ruslan Abdul Ghofur, “Kontruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 3, 3 Juni 2015, (online) tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203>. (10 Januari 2019), h 498.

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 44-45

Sedangkan pengertian perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang saling berjanji terhadap suatu hal.³⁷ Untuk terpenuhinya sebuah akad, maka dalam sebuah perikatan haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Al-aqdu* (perjanjian), yaitu sebuah pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat bagi orang yang menyatakan untuk melaksanakan janjinya tersebut.³⁸
2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Dan persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
3. Apabila kedua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak maka terjadilah apa yang dinamakan sebagai *aqdu*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ ۖ الصَّيْدُ حَرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾ (Al-Maidah)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (*Al-Maidah :1*)³⁹

³⁷Subekti,Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001)

³⁸Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 44-45

³⁹Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006).

Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Akad ini disebutkan secara umum. Dan tidak menunjukkan akad tertentu. Artinya secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah, lalu setiap mukmin wajib untuk memenuhi akad-akad tersebut. Termasuk jual beli sewa menyewa dan nikah. Dan segala yang termasuk kedaalam kategori akad jika terdapat perbedaan mengenai boleh tidaknya suatu akad, sah dan berlakunya suatu *nadzar*. Ayat diatas dapat dijadikan suatu dalil karena keumumnya tersebut menunjukkan kebolehan segala bentuk akad, termasuk akad pinjam-meminjam (*kafālāh*), sewa-menyewa/upah, jual-beli, dan sebagainya.

Menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa¹ menawarkan sejumlah hal yang dipandang sebagai rukun oleh fuqaha jumhur terhadap sebuah akad. Al Zarqa² menyebut rukun tersebut dengan *muqawimat* akad (unsur penegak akad) yang terdiri dari:

a. *Al Āqidain*

Para pihak yang melakukan akad disebut dengan *Āqidain*. Subyek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia, dan badan hukum. Manusia yang dapat dibebani hukum ialah bagi mereka yang sudah *mukallaf* atau orang yang dianggap sudah mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan tuhan maupun dalam kehidupan sosial.

b. *Mahallul Aqad* (obyek akad)

Ialah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan kepadanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk obyek akad tersebut dapat berupa benda berwujud seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud seperti manfaat dari sesuatu. Dan semua obyek tersebut dapat dibenarkan oleh syariat.

c. *Maudhu'ul Aqad* (tujuan akad)

Menurut ulama Fikih tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syari'ah tersebut. Apabila para pihak melakukan perikatan dengan tujuan yang berbeda, namun salah satu pihak memiliki tujuan yang bertentangan dengan hukum islam dengan diketahui pihak yang lainnya, maka pernikahan itupun haram hukumnya.

d. *Sighat Aqad* (ijab dan kabul)

Ijab dan kabul ialah ungkapan para pihak yang melakukan akad. Ijab adalah suatu pernyataan atau janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Ulama fikih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, atau Pihak-pihak yang melakukan akad harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum (*mukallaf*).⁴⁰

⁴⁰Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Indonesia", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 04, 4 Desember 2015, (On-line) tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214>. (10 Januari 2019), h 739.

Sewa menyewa dalam bahasa Arab di istilahkan dengan “*Al-Ijārah*” berasal dari kata “*al-Ajru*” menurut bahasa artinya adalah “*Al-Iwādh*”. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti dan upah⁴¹. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata sewa mempunyai arti pemakaian sesuatu dengan membayar uang⁴². Sedangkan menurut istilah, sewa (*al ijārah*) adalah menyerahkan (memberikan) manfaat dengan jalan penggantian.⁴³

Dengan demikian, menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk di makan, barang yang ditakar lalu ditimbang tidaklah sah, karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri. Begitu juga dengan menyewa sapi, domba atau onta untuk diambil susunya atau anaknya (jika beranak), tidaklah sah. Karena penyewaan adalah pemilikan manfaat bukan pemilikan barang/benda. Perbedaan hal ini jika antara hewan tersebut diambil manfaatnya misalnya sapi digunakan untuk membajak sawah, maka sewa menyewa semacamnya hukumnya sah.

Ijārah adalah adalah “pemiilikan jasa dari seseorang yang menyewakan (*muajjir*) oleh orang yang menyewa (*mustajir*), serta pemilik harta dari pihak *mustajir*oleh seorang *muajjir*.”⁴⁴ Dengan demikian *ijārah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.

⁴¹Hendi Suhendi. *Op.Cit*, h.14

⁴²WJS. Poerwadarminto, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976), Cet X, H, 937.

⁴³Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm.29

⁴⁴Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun System Ekonomi Alternatif Persepektif Islam*, (Surabaya: Risalah gustu, 1996), hlm. 83

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat). Atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa diikuti dengan pemindahan atas barang itu sendiri.⁴⁵

Ulama Mazhab Māliki menjelaskan bahwa *ijārah* adalah dua kata yang semakna dan searti, hanya saja mereka mengatur dalam pemberian nama dan perjanjian atas manfaat manusia dan sebagai barang yang dipindahkan seperti bekakas rumah tangga, pakaian, dan bejana serta semisalnya dengan istilah *ijārah*.⁴⁶

Sedang menurut Labib Mz yang dimaksud *ijārah* adalah memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan atas penggunaan manfaat barang yang telah dipergunakan dengan beberapa syarat dan rukun tertentu.⁴⁷

Kelompok Hanāfiah mengartikan *ijārah* dengan akad yang berupa pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang di sepakati⁴⁸. Juhur Ulama Fikih berpendapat bahawa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karna itu, merekamelarang menyewakan pohon untuk di ambil buahnya, airnya,

⁴⁵Fatwa DSN MUI, no. 09/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Ijarah*

⁴⁶Muhammad Zuhaili, *Fiqh Empat Mazhab Jilid IV*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), H.170.

⁴⁷Labib Mz, *Etika Bisnis Islam dalam Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hlm.39

⁴⁸Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29.

dan lain lain, sebab itu semua itu bukan manfaatnya melainkan bendanya.⁴⁹

Berdasarkan definisi diatas, bahwa sewa menyewa adalah memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk di ambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati oleh orang yang menyewakan dan oleh orang yang menerima. Dimana orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan bayaran sebagai atas penggunaan manfaat atau benda tersebut, dengan rukun dan syarat syarat tertentu.⁵⁰

1. Landasan Hukum Akad *Ijārah*

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijārah* adalah Al-Quran, Al-Sunah dan Al-Ijma. Dasar hukum dalam Al-Quran adalah:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (ازقرف)

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dariapa yang mereka kumpulkan”⁵¹(Q.S Az-Zukhruf: 32)

⁴⁹Rachmat Syafe’i, *op. cit* H. 12.

⁵⁰Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung JL.Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, 2005), H. 178-179.

⁵¹Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt, telah menentukan kedudukan dan kehidupan manusia di dunia, yaitu sebagian diantara mereka ada yang memiliki kedudukan/derajat yang lebih tinggi dari pada sebagian yang lain. Ada yang kaya dan ada yang miskin, ada pejabat dan rakyat biasa, ada pemimpin dan ada bawahan, ada majikan dan ada pembantu, dengan demikian sebagian mereka yang mampu memerlukan bantuan tenaga dan untuk itu mereka menyewa tenaga orang lain dan memberikan upah.

a) Dari al-Sunah (*Hadist*)

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ وَالْمُحَاقَلَةُ اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ (رواة : ملك)

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari (Ibnu Syihab) dari [Sa'id bin Musayyab] bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam melarang muzabanah dan muhaqalah. Muzabanah ialah menjual kurma yang belum jadi dengan kurma masak, sedangkan muhaqalah ialah menjual hasil tanaman dengan gandum, atau menyewakan tanah dan dibayar dengan gandum." Ibnu Syihab berkata, "Saya bertanya kepada Sa'id bin Musayyab mengenai hukum menyewakan tanah dan dibayar

dengan emas atau uang." Lalu dia menjawab; "Tidak apa-apa" (H.R Maliki 1142)⁵²

Fukaha sama sekali tidak memperbolehkan menyewakan tanah yaitu, Thawus dan Abu Bakar bin Abdurrahman. Adapun jumhur Fukaha pada umumnya memperbolehkan menyewakan tanah dengan syarat harus menjelaskan barang yang disewakan dan upah, baik itu berbentuk tanaman, atau tumbuhan ataupun bangunan.

b) Landasan *Ijmā'*

Semua umat Islam telah sepakat mengenai di syari'atkan *ijārah*, tak seorangpun ulama yang membantah kesepakatan *ijmā'* ini, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sayid Sabiq, dan atas disyariatkan sewa-menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius), pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *ijmā'* para ulama.⁵³ Mengenai diperbolehkannya sewa-menyewa, semua ulama bersepakat bahwa sewa menyewa diperbolehkan.

Tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijmā'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak signifikan. Dengan tiga dasar hukum yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits, dan *Ijmā'* maka hukum diperbolehkannya sewa-

⁵²Al-Hasyimi, Sayyid Ahmad, *Syarah Mukhta'arul Ahādīst*, (Bandung, Sinar Baru, 1993) hlm, 406.

⁵³Sayid Sabiq, *op. cit.* hlm 30

menyewa sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalan hukum Islam yang utama.⁵⁴

Berdasarkan beberapa dasar di atas, kiranya dapat dipahami bahwa sewa-menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lainnya selalu terikat dan saling membutuhkan, dan sewa menyewa/upah adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijārah*

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal hal yang mengakibatkan atau yang mewajibkan *fasakh*.⁵⁵ *Ijārah* akan menjadi (*fasakh*) batal apabila terdapat hal-hal sebagai berikut⁵⁶

a. Terjadinya Cacat Pada Barang Sewaan

Terjadi cacat pada barang sewaan maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika berada di tangan pihak penyewa. Dalam hal ini kerusakan diakibatkan oleh kelalaian pihak penyewa itu sendiri. Misalnya penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukannya, barang sewaan

⁵⁴Rachmad Syafe'i. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 123.

⁵⁵Sohari Sahari, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

⁵⁶Khumaidi Ja'far, *Op.Cit.* h.183-185

disalahgunakan dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan kepada pihak penyewa.

b. Rusaknya Barang Yang Disewa

Maksudnya bahwa barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau rusak sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang telah menjadi perjanjian.

c. Masa Sewa Menyewa Telah Habis.

Maksudnya sewa menyewa barang yang telah habis waktunya sebagaimana yang telah di sepakati bersama, maka dengan sendirinya perjanjian sewa menyewa barang tersebut berakhir (batal).

d. Adanya *Uzur*

Maksudnya *uzur* adalah sesuatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa yang telah diadakan sebelumnya kepada pihak penyewa.

C. Pengertian Akad *Qardh*

Qardh secaraetimologiberarti pinjaman. Secara terminologi muamalah adalah memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama.⁵⁷ *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad akan saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁵⁸

Jadi, *qardh* merupakan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu.⁵⁹ Akad *qard* diperbolehkan dengan 2 syarat yaitu:⁶⁰

- a. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi pemberi pinjaman.
 - b. Akad *qardh* tidak digabung dengan akad lain, seperti akad jual beli.
- Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan

⁵⁷Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 137

⁵⁸Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 131.

⁵⁹Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 141

⁶⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 257.

1. Dasar Hukum Akad *Qard*

Berikut ini merupakan landasan syāriah tentang pembiayaan *qardh* baik dari Al-Quran, Al-Hadist maupun *Ijmā'*:

a. Landasan al-Quran QS. Al-Hadid Ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

(ال حدند)

Artinya : “Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”⁶¹

b. Landasan Hadist

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عَنْهُ يُقْضَى حَتَّى بِدَيْنِهِ مُعَلَّقَةُ الْمُؤْمِنِ نَفْسُ (رواة : ابن ماجة)

Artinya: Jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutang nya hingga ia melunasinya (HR. Ibnu Majah)⁶²

c. *Ijmā'*

Para ulama telah menyepakati bahwa boleh *qard* dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang

⁶¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 538.

⁶²Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir (no.6779), al-Misykah (no.2915), Sunan at-Tirmidzi (II/270, No.1084)

memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁶³

2. Rukun Dan Syarat-Syarat Akad *Qard*

Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari memberi penjelasan bahwa rukun utang-piutang itu sama dengan jual beli yaitu:

- a. *Aqid* yaitu yang berutang dan yang berpiutang.
- b. *Ma'qud 'alayh* yaitu barang yang diutangkan.
- c. *Shigat* yaitu *ijab qabul*, bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.

Menurut M. Yazid Afandi M. Ag. bahwa rukun utang-piutang ada empat macam:

- a. *Muqridh* yaitu orang yang mempunyai barang untuk dihutangkan.⁶⁴
- b. *Muqtaridh* yaitu orang yang mempunyai hutang.
- c. *Muqtaradh* yaitu objek yang dihutang.
- d. *Shigat Akad* yaitu *ijab qabul*.

Utang-piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada utang-piutang itu sendiri. Rukun adalah unsur esensial dari sesuatu, sedang syarat adalah prasyarat dari sesuatu. Adapun yang menjadi syarat utang-piutang adalah:

⁶³Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 132.

⁶⁴Ghufron A. Mas, *adi, op. cit*, hlm. 173.

a. Aqid (orang yang berutang dan berpiutang)

Aqid adalah orang yang melakukan akad, keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan sebagai akad jika tidak ada aqid. Begitu pula tidak akan terjadi ijab dan qabul tanpa adanya aqid.

Orang yang berutang dan yang berpiutang boleh dikatakan sebagai subyek hukum. Sebab yang menjalankan kegiatan utang-piutang adalah orang yang berutang dan orang yang berpiutang. Untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap mendermakan harta, sebab akad utang-piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang-piutangnya dihukumi sah.⁶⁵

Menurut Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan bahwa 4 orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*), orang gila, hamba sahaya, walaupun *mukallaf* dan orang buta. Sementara dalam *Fikih Sunnah* disebutkan bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan yang jelek (memilih) tidak sah.

⁶⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira), Cet I, 2010, hlm. 20.

b. Obyek Utang

Di samping adanya *ijab qabul* dan pihak-pihak yang melakukan utang-piutang, maka perjanjian utang-piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat obyek yang menjadi tujuan diadakannya utang-piutang. Tegasnya harus ada barang yang akan diutangkan. Untuk itu obyek utang-piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
- 2) Dapat dimiliki.
- 3) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang.
- 4) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.⁶⁶

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahkan dan dapat dijadikan barang pesanan (*muslam fih*), yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis dan karakteristiknya diketahui karena dengan jelas. Menurut pendapat shahih, barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan.

Qardh juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh. Karena *qardh* menuntut pengembalian barang yang sepadan, jika kadar barang tidak diketahui

⁶⁶Abdurrahman al-Jaziri *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Arba'ah*, Juz 2, (Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah), 1996, hlm. 304.

tentu tidak mungkin melunasinya.⁶⁷ Perjanjian utang-piutang itu disyariatkan secara tertulis, untuk menjamin agar jangan sampai terjadi kekeliruan atau lupa, baik mengenai besar kecilnya utang atau waktu pembayarannya. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
(ال ناقة) (TAT)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."* (QS. Al-Baqarah: 282)

Pencatatan ini disyaratkan, supaya mereka mudah dalam menuntut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh temponya. Disamping disyariatkan secara tertulis, dalam utang-piutang itu diperlukan juga adanya saksi.

c. *Shigat (Ijab dan Qabul)*

Suatu bentuk muamalah yang mengikat pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya, selanjutnya melahirkan kewajiban, diperlukan adanya perjanjian antara pihak-pihak itu. Perjanjian di dalam hukum Islam disebut dengan akad.⁶⁸

Akad (perjanjian) dilakukan sebelum terlaksananya suatu perbuatan, dimana pihak yang satu berjanji untuk melakukan sesuatu

⁶⁷Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve), Cet. 1, 1996, hlm. 1892.

⁶⁸Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit, hlm. 70.

hal atau tidak melakukan dan lainnya itu berhak atas apa yang dijanjikannya itu untuk menuntutnya bila tidak sesuai dengan perjanjian.⁶⁹ Akad menurut bahasa berarti menyimpulkan, mengikat (tali). Menurut istilah adalah perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

Dari definisi di atas dapat diambil pengertian, akad adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Sifat kerelaan itu bisa terwujud dan jelas apabila telah nyata-nyata diucapkan secara lisan oleh keduanya.

Ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan *qabul* adalah penerimaan dari pihak yang berutang. *Ijab qabul* harus dengan lisan, seperti yang telah dijelaskan di atas, tetapi dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.⁷⁰

Perjanjian utang-piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan uang yang diutangkan kepada pihak kedua dan pihak kedua telah menerimanya dengan akibat bila harta yang diutangkan tersebut rusak atau hilang setelah perjanjian terjadi tetapi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama.⁷¹ Berkaitan dengan pengertian akad tersebut, maka terdapat

⁶⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2008, hlm. 46.

⁷⁰Ghufron A Mas'adi, *Op. Cit*, hlm. 90-91.

⁷¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2008, hlm. 38.

ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1. Pihak yang bertransaksi

Keduanya harus memenuhi persyaratan: dewasa (mampu bertindak), berakal sehat, dan tidak berada pada pengampunan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (ان سياء ﴿٥﴾)

Artinya: *"Dan janganlah kalian serahkan harta orang-orang bodoh itu kepadanya yang mana Allah akan memelihara kalian dan berikanlah kepada mereka belanja dari hartanya itu".*(QS. An-Nisa": 5)⁷²

Dalam akad harus terdapat unsur kerelaan dari kedua belah pihak, serta akad harus jelas dan dimengerti maksudnya oleh masing-masing pihak.

2. Mengenai suatu barang tertentu, barang yang menjadi obyek akad harus jelas dari kesamaran.

⁷²Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit, hlm. 115.

3. Mengenai suatu barang yang halal, suci dari najis dan yang tidak haram dimakan.⁷³ Di atas telah disebutkan bahwa akad adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Adapun yang dimaksud dengan *ijab* dan *qabul* secara jelasnya adalah *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu seorang yang berakad, buat memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. *Qabul* adalah jawaban dari pihak yang lain sesudah adanya *ijab*, buat menyatakan persetujuannya. Kaitannya dengan masalah utang diperlukan juga adanya akad ini (*ijab qabul*). Sebagaimana pengertian *ijab qabul* di atas, maka dalam masalah utang, pihak yang berutang dapat melakukan *ijab*.⁷⁴

Akad dalam masalah utang adalah *akad tamlik*, karena itu tidak sah kecuali dari orang yang boleh menggunakan harta (milik sendiri dan tidak berada dalam pengampuan). Tidak sah pula kecuali dengan *ijab* dan *qabul* seperti akad jual beli dan hibah, karena itu akad dinyatakan sah dengan memakai akad lafadz *qardh*, *salaf* dan semua lafadz yang mempunyai arti dan maksud yang sama, seperti kata-kata aku berikan kepemilikan harta ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya kepadaku.

39. ⁷³Ali Fikri, *al-Mu'allamatul Maiyah wal Adabiyah*, Bab I, (Berit: Daral-Fikr), hlm. 34-

⁷⁴Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Op. Cit*, hlm. 27.

3. Fatwa DSN Tentang *Qard Wal Ijārah*

Pembiayaan talangan haji atau umroh merupakan produk yang memiliki potensi yang cukup besar. Hal tersebut banyak mengundang masyarakat yang ingin menunaikan umroh. Undang-undang No. 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji, mengamanatkan pemerintah agar melibatkan peran serta masyarakat luas dalam hal pelayanan dan pengorganisasian serta pengawasan, penyelenggaraan ibadah haji, memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi jamaah haji serta upaya meningkatkan pelayanandengan menghilangkan monopoli. Dalam kegiatan ini, Dewan Syariah Nasional memberikan kesempatan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya, termasuk pengurusan haji mupun umroh dan talangan perlunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

Dasar dikeluarkannya pembiayaan ini adalah Q.S. al Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَكَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

(ال حدند)

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Pembiayaan talangan haji atau umroh biasanya menggunakan akad *qardh wal ijārah*,,diberikan kepada nasabah calon haji atau umroh dalam rangka memperoleh nomor porsi haji atau pelunasan BPIH (Biaya

Pelunasan Ibadah Haji). *Qardh wal ijārah* adalah akad yang terjadi antara bank/jasa keuangan dengan nasabah calon haji sehubungan dengan pemberian pinjaman uang oleh bank/jasa keuangan kepada nasabah untuk memenuhi syarat mendapatkan porsi haji atau pelunasan BPIH. Bank memungut biaya *fee* administrasi yang wajar atas jasa Bank dalam pengurusan kepentingan nasabah. Penggunaan akad ini berdasarkan fatwa pembiayaan pengurusan haji dan umroh yaitu, fatwa DSN 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan haji dan umroh Lembaga Keuangan Syariah dengan dua ketentuan yaitu :

1. Ketentuan Umum

- a. Dalam pengurusan haji atau umroh bagi nasabah LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijārah*.
- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *Al-Qardh*.
- c. Jasa pengurusan haji dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji dan umroh.
- d. Besar imbalan jasa *Al- Ijārah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *Al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

2. Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak maka, penyelesaian dilakukan

melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dirubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 15 Rabiul Akhir 1423 H/ 26 Juni 2002 M
(Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2003:179-180).

Qardh sendiri adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam ketentuan fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Sedangkan *ijarāh* adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaanya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarāh* ini objek transaksinya adalah jasa. Penggunaan akad *qardh* pada pembiayaan talangan haji ini pada dasarnya adalah pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan. Namun, bank tidak mengambil keuntungan dari akad ini, tetapi bank mengambil keuntungan dari

penggunaan akad *ijarāh*, dengan mengambil upah jasa (*fee ujrah*) dari biaya–biaya administrasi pengurusan haji.⁷⁵



⁷⁵Ika Setiana , Analisis Penerapan Akad Qard Wal Ijarah Pada Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, *JurnalRaushan Fikr*, Vol. 4 No.2, Juli 2014

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah PT. FIF Kotabumi

PT. FIF didirikan dengan nama PT. Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989. Berdasarkan ijin usaha yang diperolehnya maka Perseroan bergerak di bidang Sewa Guna Usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Pada Tahun 1991, Perseroan merubah nama perusahaan menjadi PT. Federal International Finance, namun seiring dengan perkembangan waktu dan guna yang memenuhi permintaan pasar, Perseroan mulai memfokuskan diri pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996.⁷⁶

Ketika krisis mulai terjadi pada tahun 1997 Perseroan melakukan konsolidasi internal dalam rangka persiapan menuju ke suatu sistem komputerisasi yang tersentralisasi dan terintegrasi. Perseroan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT. Astra International Tbk telah mengembangkan usahanya dan membuka cabang di seluruh Indonesia sampai saat ini PT. FIF telah memiliki cabang sebanyak 500 cabang, PT. FIF Cabang Kotabumi mulai diresmikan pada Tahun 2001.

⁷⁶Putri Auliana (Marketing), *Wawancara*, Kotabumi 20 Juli 2018

2. Visi dan Misi PT. FIF Kotabumi

Visi dan Misi PT. FIF cabang Kotabumi sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan oleh PT. FIF pusat. Penjabaran visi dan misi perseroan adalah sebagai berikut:

Visi: *“Menawarkan solusi keuangan terbaik bagi para pelanggan secara individual”*

Misi:

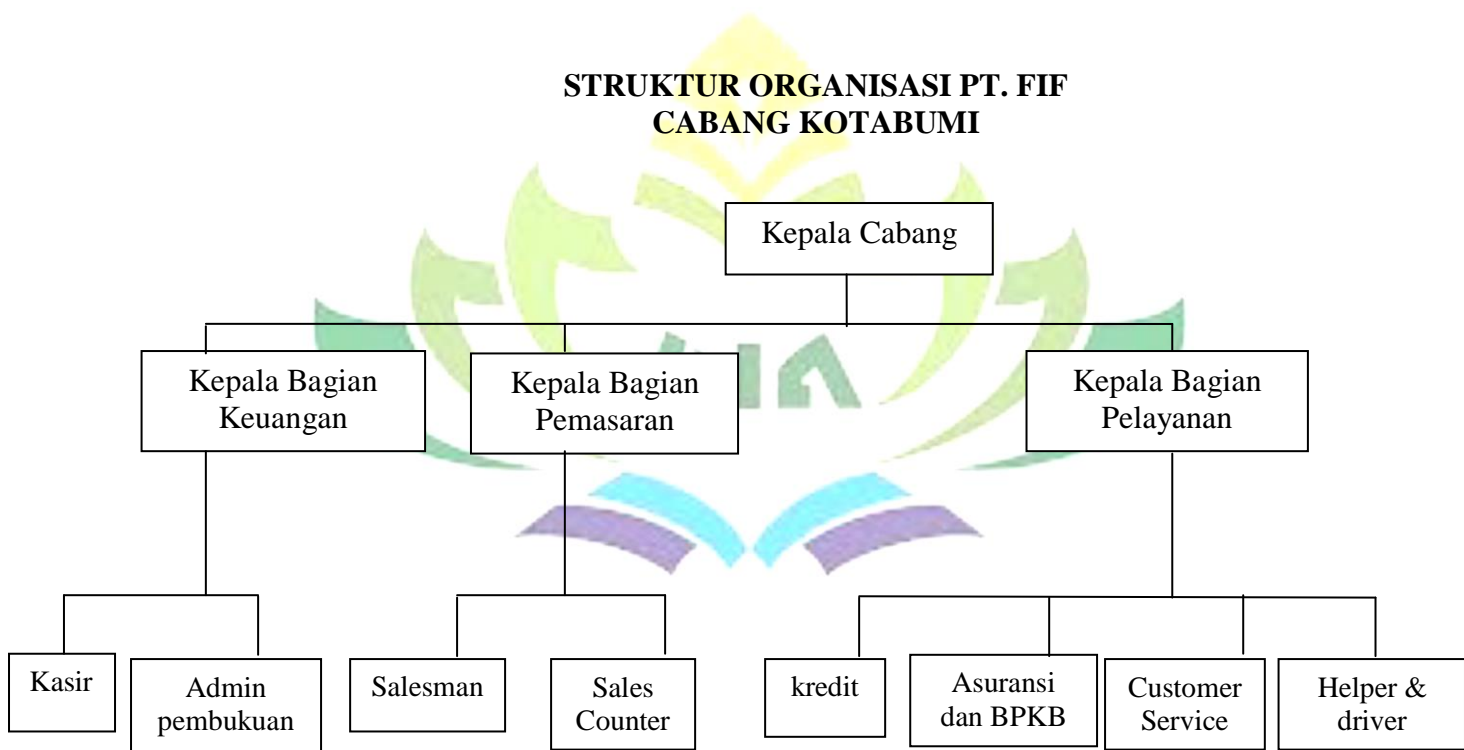
- a. Beroperasi secara lugas dengan tetap mengindahkan aspek kehati-hatian
- b. Berkontribusi dalam meningkatkan distribusi sepeda motor produk Astra
- c. Memenuhi harapan pelanggan, karyawan, pemegang saham, kreditur dan pemerintah
- d. Menawarkan produk yang terjangkau bagi pelanggan
- e. Memanfaatkan infrastruktur untuk kredit mikro, pinjaman tanpa jaminan dan bisnis penggadaian⁷⁷

3. Struktur Organisasi

Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda-beda, tergantung dari sifat perusahaan itu sendiri dan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai organisasi maka terlebih dahulu harus diketahui struktur organisasinya. Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya struktur organisasi memungkinkan

⁷⁷Putri Auliana (Marketing), Wawancara, Kotabumi 20 Juli 2018

adanya kerjasama yang harmonis antar berbagai individu dalam organisasi guna meningkatkan tujuan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan maka diperlukan kerjasama dan kesatuan pendapat, kerjasama ini meliputi adanya pembagaian tugas dan tanggung jawab secara sistimatis dalam struktur organisasi perusahaan. PT. FIF Cabang Kotabumi dipimpin oleh seorang Kepala Cabang, yang membawahi beberapa bagian dan seksi. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi PT. FIF Cabang Kotabumi dapat dilihat pada gambar berikut:⁷⁸



Sumber: Data FIF Cabang Kotabumi 2017

⁷⁸Putri Auliana (Marketing), *Wawancara*, Kotabumi 20 Juli 2018

Adapun pembagian tugas dan wewenang pada struktur organisasi PT FIF Cabang Kotabumi adalah sebagai berikut:

a. Kepala Cabang

Kepala Cabang adalah fungsi eksekutif tertinggi yang mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

- 1) Menjaga agar perusahaan cabang dapat berkembang dan maju.
- 2) Mempunyai wewenang penuh untuk mengatur perusahaan cabang secara keseluruhan.
- 3) Membuat perencanaan perusahaan cabang yang dibantu oleh kepala-kepala bagian lainnya

b. Kepala Bagian Keuangan

Kepala Bagian Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang. Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya adalah:

- 1) Mengkoordinir dan mengawasi keuangan dan pembukuan agar tidak terjadi kekeliruan dan penyelewengan dalam penerimaan dan pengeluaran uang, barang, dan surat-surat berharga lainnya.
- 2) Memeriksa laporan keuangan seksi atau bagian-bagian dibawahnya untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Cabang.
- 3) Mencatat secara tertib pengeluaran dan penerimaan uang, maupun pembelian kredit, pembelian potongan harga pembelian barang dengan pembayaran tunai, begitu pula dengan pengeluaran dan penerimaan uang masing-masing bagian dalam perusahaan dan bertanggung jawab langsung Kepala Cabang.

c. Kepala Bagian Pemasaran

Kepala Bagian Pemasaran bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang. Tugas pokok dan tanggung jawabnya adalah :

- 1) Memasarkan hasil produksi perusahaan kepada konsumen.
- 2) Membuat rencana mengenai kegiatan pemasaran seperti promosi dan penetapan saluran distribusi.

d. Kepala Bagian Pelayanan

Kepala Bagian Gudang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang. Tugas pokok dan tanggung jawabnya adalah :

- 1) Mengkoordinasikan bagian-bagian di bawahnya.
- 2) Membuat rencana mengenai kegiatan pelayanan.

e. Kasir

Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab bagian kasir adalah :

- 1) Mengkoordinir tugas kas.
- 2) Mengelola penerimaan dan pengeluaran uang atau surat berharga menurut ketentuan yang berlaku.
- 3) Membuat laporan pengeluaran kas setiap bulan.

f. Administrasi Pembukuan

Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab bagian administrasi pembukuan yaitu:

- 1) Menyusun laporan keuangan pada setiap akhir bulan.
- 2) Menyusun dan membukukan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

- 3) Setiap akhir tahun mempersiapkan bahan untuk laporan dan penyusunan neraca serta daftar perhitungan rugi laba.

g. Salesman

Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab bagian Salesman yaitu:

- 1) Mencari dan memprospek calon pembeli/konsumen
- 2) Menawarkan barang-barang dan melakukan penjualan
- 3) Mengantarkan barang-barang kepada para pembeli atau pelanggan (barang diantar sampai tujuan)
- 4) Mengunjungi para pelanggan

h. Sales Counter

Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab bagian *Sales Counter* yaitu:

- 1) Menyambut dan memprospek calon pembeli/konsumen yang datang ke *Counter*
- 2) Menawarkan barang-barang dan melakukan penjualan pada calon pembeli/ konsumen yang datang ke *Counter*.

i. Customer Service

Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab bagian teknis adalah melakukan perawatan dan perbaikan produk serta berbagai peralatan teknis kantor lainnya. Bagian teknis juga bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan persediaan produk untuk dipasarkan pada konsumen.

j. Helper dan Driver

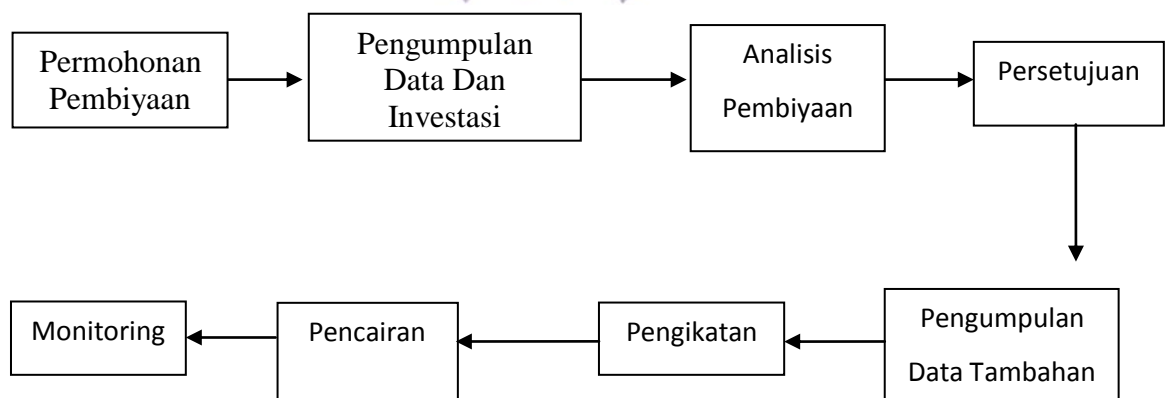
Tugas pokok dan tanggung jawab bagian *Helper* adalah membantu secara umum tugas-tugas pada bagian lainnya dan berkoordinasi dengan seluruh bagian, sedangkan bagian *Driver* bertugas mengantarkan produk kepada para pembeli/pelanggan atau barang diantar sampai tujuan.

B. Praktik Produk Pembiayaan Talangan Umroh Melalui Jasa Keuangan

PT. FIF Kotabumi

Dalam praktik pelaksanaan obyek talangan biaya umroh pada jasa keuangan (FIF) di Kotabumi dalam mengambil besarnya keuntungan tergantung pada besarnya DP (*Down Payment*) dan lamanya masa pelunasan (masa angsuran). Jadi apabila DP yang diberikan kepada pihak jasa keuangan FIF kecil maka angsuran yang diberikan dari pihak jasa FIF akan tergantung pada nasabah.

Skema Proses Pembiayaan



1. Prosedur Analisis Pembiayaan ⁷⁹

a. Tahap pemberkasan

Tahap yang meliputi pemberian informasi tentang persyaratan, wawancara, dan pengisian formulir permohonan.

b. Pengumpulan Data dan Investigasi

Menyelidiki tentang dokumen-dokumen yang diajukan, tujuannya adalah apakah berkas yang sudah masuk sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk menguji keaslian dan kebenaran tentang berkas yang dilampirkan tersebut.

c. Analisis pembiayaan

Aspek aspek dalam analisi pembiayaan meliputi:

1) Tujuan pembiayaan

Pada awalnya tujuan pembiayaan haruslah jelas dan detail mengenai pendekatan logis mengenai data yang dikaji agar tercapai.

Tujuan pembiayaan meliputi:

- a) Besarntya kebutuhan fasilitas pembiayaan yang diajukan
- b) Kegunaan fasilitas pembiayaan yang diajukan
- c) Jangka waktu dari fasilitas pembiayaan yang diajukan.

2) Latar belakang calon nasabah

Latar belakang mengenai data kualitatif tentang calon nasabah dan karakter nasabah

3) Kondisi usaha.

⁷⁹Putri Auliana (Marketing), *Wawancara*, Kotabumi 20 Juli 2018

- 4) Analisis keuangan calon nasabah.
- 5) Analisis atas barang yang dijaminan dalam pembiayaan
- 6) Analisis resiko pembiayaan merupakan penjabaran mengenai kemungkinan resiko tentang pembiayaan.

d. Wawancara awal

Penyelidikan awal mengenai calon nasabah untuk menyakinkan pihak yang mengeluarkan pembiayaan bahwa berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap dengan apa yang telah ditentukan.

e. *On the spot*

Tahap ini merupakan tahap kegiatan pemeriksaan dilapangan berdasarkan meninjau dari berbagai objek yang dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara.

f. keputusan pemberian pinjaman

Keputusan dalam hal ini berupa apakah pembiayaan akan diterima atau ditolak. Pada umumnya keputusan tersebut:

- 1) Jumlah uang yang diterima
- 2) Jangka waktu pembiayaan
- 3) Biaya-biaya yang harus dibiayai.
- 4) Waktu pencairan dana

Jika permohonan biaya ditolak maka pihak pembiayaan akan melakukan pemberitahuan kepada calon nasabah ataupun diberitahukan melalui surat penolakan.⁸⁰

⁸⁰Putri Auliana (Marketing), *Wawancara*, Kotabumi 20 Juli 2018

g. Penandatanganan akad

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka dari sebelum dana dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani surat persetujuan akad pembiayaan, penandatanganan dilakukan:

- 1) Antara pihak perusahaan dan pihak nasabah
- 2) Dengan melalui pihak notaris

h. Realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan dilakukan setelah penandatanganan akad dan surat menyurat.

i. Penyaluran dan Penarikan Dana

Tahap ini adalah pencairan dan pengambilan dana langsung baik dari bank maupun bisa diambil langsung lewat perusahaan(pembiayaan). Dan bisa diambil berdasarkan tujuan dari pembiayaan tersebut.

2. Penilaian Kelayakan Pemberian Pembiayaan⁸¹

Ada beberapa syarat yang digunakan dalam pembiayaan yang sering dilakukan yaitu seperti analisis 3C, dan Analisis 3P dan studi kelayakan.

Syarat pemberian pembiayaan dengan analisis 3C:

a. *Charakter* (karakter/akhlak)

Karakter dapat terlihat dari interaksi kehidupan dengan seseorang dengan keluarganya dan tetangganya. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai karakter seseorang biasanya dilakukan dengan bertanya

⁸¹Putri Auliana (Marketing), Wawancara, Kotabumi 20 Juli 2018

kepada tokoh masyarakat setempat maupun tetangga calon penerima pembiayaan.

b. *Conditional of economi*(kondisi ekonomi)

Usaha yang dijalani oleh calon penerima pembiayaan harus baik, dalam arti mampu mencukupi hidup keluarganya dan dapat menutupi biaya pinjaman.

c. *Capatity* (kemampuan manejeral)

Calon penerima pembiayaan harus mempunyai kemampuan manajerial yang tangguh agar dapat membagi pengeluaran untuk cicilan pembiayaan setiap bulan.

Sementara itu penilaian dengan 3P kredit sebagai berikut:⁸²

a. *Personality*

Yaitu menelaii nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. Hal tersebut juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi sesuatu.

b. *Prospect*

Yaitu menilai usaha nasabah bagaimana dia dapat mengembalikan pinjaman yang telah diterimanya dimasa yang akan datang.

c. *Payment*

Yaitu ukuran bagaimana nasabah mengembalikan cicilan yang telah ditalangi atau dari mana saja dana untuk pengembalian pinjaman

⁸²Putri Auliana (Marketing), *Wawancara*, Kotabumi 20 Juli 2018

yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan nasabah akan semakin baik.

Seperti yang kita ketahui bahwa akad dalam ekonomi Syari'ah sangatlah banyak, tetapi pada suatu instansi keuangan syari'ah tidak semua akad mereka laksanakan dalam program kerjanya. Seperti pada FIF Kotabumi dengan Produknya yaitu AMITRA ini hanya melakukan beberapa akad yang termasuk dalam program kerjanya, yaitu diantaranya:

1. Akad *Murābahah*

Yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

2. Akad *Ijārah*

Yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atau suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

3. Akad *Qardh*

Yaitu akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Akad *Qardh Wal Ijārah* untuk dana talangan umroh termasuk produk baru dari PT. FIF Kotabumi(AMITRA).

Sebelum penelititi mewawancarai para narasumber sebenarnya umroh yang ada di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi memiliki 2 pilihan dalam melakukan umroh yaitu umroh plus dan umroh biasa. Disini peneliti

hanya mengangkat umroh biasa karena banyak dari masyarakat (orang awam) yang berangkat melalui jalur umroh biasa karena terbentur masalah biaya yang membedakan antara umroh plus dan umroh biasa dan sebagai Dewan Pengawas Syariah untuk platform PT. FIF (AMITRA) ini yaitu Dr. H. Endy M. Astiwara, MA, FIIS dan Drs. H. Aminudin Yakub, MA.

1. Peneliti melakukan wawancara pada *informan pertama* yaitu dengan Bapak Roganda Tsemawora selaku Leader Cabang di PT. FIF Kotabumi. Akad *Qard Wal Ijārah* adalah akad yang digunakan untuk jenis pembiayaan untuk dana talangan Umroh pada PT. FIF Kotabumi (AMITRA).

2. Mekanisme Talangan Umroh

Mekanisme atau tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan pembiayaan Ijārah untuk dana talangan Umroh ini sebagai berikut:

- a. Sebelum anggota ingin ikut dalam pelaksanaan Umroh di PT. FIF Kotabumi (AMITRA) ini, anggota wajib melakukan survey ke AMITRA untuk menanyakan mekanisme pelaksanaan Akad Ijārah tersebut.
- b. Anggota wajib melampirkan identitas dan syarat-syarat yang harus dilampirkan seperti, fotocopy KTP Suami Istri, fotocopy kartu keluarga, Rekening Bank/Listrik, Slip Gaji Pegawai.
- c. Akad *ijārah* ini merupakan akad yang mengandalkan upah dari anggota dalam pelaksanaannya, karena pihak PT. FIF Kotabumi(AMITRA) telah memfasilitasi anggota untuk melaksanakan

Umroh tersebut. Disini anggota dan pihak PT. FIF Kotabumi (AMITRA) akan melakukan tawar menawar dari upah (*Ujrah*) yang akan diterima oleh pihak FIF, ketika anggota dan pihak FIF telah sepakat dengan *ujrah* yang ditetapkan antara kedua pihak maka proses dapat dilanjutkan.

- d. Setelah anggota paham dengan ketentuan yang diberikan oleh pihak PT. FIF Kotabumi (AMITRA), anggota wajib memberikan DP atau uang muka sebesar.
- e. Setelah urusan administrasi selesai pihak PT. FIF Kotabumi (AMITRA) akan mengantarkan anggota yang ikut umroh untuk membuat paspor ke badan imigrasi dan melakukan cek kesehatan serta suntik meningitis sebelum pemberangkatan umroh tersebut.
- f. Setelah semua urusan anggota terselesaikan, pihak PT. FIF Kotabumi (AMITRA) melakukan pembayaran pelunasan biaya umroh kepada travel di pusat seminggu setelah kelengkapan surat menyurat dari anggota terselesaikan.
- g. Anggota akan mendapatkan perlengkapan umroh seperti koper, pakaian ihrom, air zam-zam dll dari pihak PT. FIF Kotabumi (AMITRA).
- h. Setelah itu, anggota tinggal menunggu keberangkatan umroh.⁸³

Dibawah ini peneliti akan menjelaskan tentang perhitungan pemberian *qardh* serta upah (*ujrah*) sesuai yang terjadi di PT. FIF (AMITRA) cabang

⁸³Roganda (HRD), Wawancara, Kotabumi, 20 Juli 2018

Kotabumi, *informan ke-dua* yaitu Bapak Hendra Beliau Mengatakan⁸⁴ “Saya ingin melakukan ibadah umroh dengan menggunakan akad *ijārah* di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi ini. Setelah melakukan registrasi dengan memberikan ketentuan dan syarat-syarat yang diberikan oleh PT.FIF Kotabumi”.

1. Bapak Hendra memberikan uang muka yang telah ditentukan PT. FIF (AMITRA) oleh sebesar Rp 5.000.000,-/orang. Bapak Hendra berniat melakukan ibadah Umroh, biaya umroh yang telah ditetapkan dari PT. FIF (AMITRA) sebesar Rp25.000.000,-/orang.

Adapun mekanismenya:

Biaya umroh Rp25.000.000,-/orang,- Uang muka total Bapak Hendra adalah Rp. 5.000.000,- Jadi kekurangan biaya Umroh Rp 25.000.000– Rp 5.000.000 = Rp 20.000.000,-/orang. Biaya *Qardh* yang harus dibayar oleh Bapak Hendra sebesar Rp.20.000.000 selain itu pihak PT. FIF (AMITRA) Telah menetapkan berapa besarnya upah berdasarkan *Ujrah* yang telah tertera pada brosur terhadap pelaksanaan Akad *Ijārah* tersebut, akhirnya kedua belah sepakat untuk memberikan *Ujrah* dari kekurangan biaya umroh tersebut. Dan nasabah telah sanggup untuk membayar cicilan kekurangan biaya umroh tersebut selama **2 tahun.**

Kekurangan biaya Umroh per orang Rp 20.000.000,-: 24 bulan karena 2 tahun = Rp 1.119.000,-/bulan.

⁸⁴Bapak Hendra (Nasabah), *Wawancara*, Kotabumi, 12 Oktober 2018

Jadi Ujroh per orang: $\text{Rp } 1.119.000 \times 24(\text{Bulan}) + \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 31.856.000 - \text{Rp } 25.000.000 = \text{Rp } 6.856.000 \text{ (Ujrah/orang)}$.

Setelah itu, tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan pembiayaan *ijārah* untuk dana talangan Umroh pada PT. FIF Kotabumi (AMITRA). Peneliti akan menjelaskan tentang perhitungan pemberian Upah (*Ujrah*) sesuai yang terjadi di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi. Dengan *informan* ke-tiga yaitu dengan Bapak Khaidir beliau Mengatakan⁸⁵: “Beliau ingin melakukan Ibadah umroh dengan menggunakan akad *Ijārah* di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi ini. Setelah melakukan registrasi dengan memberikan ketentuan dan syarat-syarat yang diberikan oleh PT.FIF Kotabumi”.

2. Bapak Khaidir ini memberikan uang muka yang telah ditentukan PT. FIF (AMITRA) oleh sebesar Rp 5.000.000,-/orang. Bapak Khaidir berniat melakukan ibadah Umroh, biaya umroh yang telah ditetapkan dari PT. FIF (AMITRA) sebesar Rp25.000.000,-/orang.

Adapun mekanismenya:

Biaya umroh Rp25.000.000,-/orang,- Uang muka total Bapak Khaidir adalah Rp. 5.000.000,- Jadi kekurangan biaya Umroh $\text{Rp } 25.000.000 - \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 20.000.000,-/\text{orang}$. Biaya *Qardh* yang harus dibayar oleh Bapak Khaidir sebesar Rp.20.000.000 selanjutnya pihak PT. FIF (AMITRA) Telah menetapkan berapa besarnya upah berdasarkan *ujrah* yang telah tertera pada brosur terhadap pelaksanaan Akad *ijārah* tersebut,

⁸⁵Bapak Khaidir (Nasabah), Wawancara, 15 Oktober 2018

akhirnya kedua belah sepakat untuk memberikan *ujrah* dari kekurangan biaya umroh tersebut. Dan nasabah telah sanggup untuk membayar cicilan kekurangan biaya umroh tersebut selama **4 tahun**.

Kekurangan biaya Umroh per orang Rp 20.000.000,-: 48 bulan karena 4 tahun = Rp 721.000,-/bulan.

Jadi *ujrah* per orang: Rp 721.000x 48(Bulan) + Rp 5.000.000= Rp39.608.000– Rp 25.000.000= **Rp 14.608.000 (Ujrah/orang)**.

Kemudian, setelah tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan pembiayaan *ijārah* untuk dana talangan Umroh pada PT. FIF Kotabumi (AMITRA). Peneliti akan menjelaskan tentang perhitungan pemberian Upah (*ujrah*) sesuai yang terjadi di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi. *Informan ke-empat* yaitu dengan Ibu Khusnawati Mengatakan⁸⁶: “Beliau ingin melakukan ibadah umroh dengan menggunakan akad *ijārah* di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi ini. Setelah melakukan registrasi dengan memberikan ketentuan dan syarat-syarat yang diberikan oleh PT.FIF Kotabumi”.

3. Ibu Khusnawati ini memberikan uang muka yang telah ditentukan PT. FIF (AMITRA) oleh sebesar Rp 5.000.000,-/orang,. Ibu Khusnawati berniat melakukan ibadah Umroh, biaya umroh yang telah ditetapkan dari PT. FIF (AMITRA) sebesar Rp25.000.000,-/orang.

Adapun mekanismenya:

⁸⁶Ibu Khusnawati (Nasabah), *Wawancara*, 16 Oktober 2018.

Biaya umroh Rp25.000.000,-/orang,- Uang muka total Ibu Khusnawati adalah Rp. 5.000.000,- Jadi kekurangan biaya Umroh Rp 25.000.000– Rp 5.000.000 = Rp 20.000.000,-/orang. Biaya *Qardh* yang harus dibayar oleh Ibu Khusnawati sebesar Rp.20.000.000 selanjutnya pihak PT. FIF (AMITRA) telah menetapkan berapa besarnya upah berdasarkan *Ujrah* yang telah tertera pada brosur terhadap pelaksanaan Akad *Ijārah* tersebut, akhirnya kedua belah sepakat untuk memberikan *Ujrah* dari kekurangan biaya umroh tersebut. Dan nasabah telah sanggup untuk membayar cicilan kekurangan biaya umroh tersebut selama 3 tahun.

Kekurangan biaya Umroh per orang Rp 20.000.000,-: 36 bulan karena 3 tahun = Rp 850.000,-/bulan.

Jadi *ujrah* per orang: Rp 850.000 x 36(Bulan) + Rp 5.000.000= Rp35.600.000– Rp 25.000.000= **Rp 10.600.000 (Ujrah/orang).**

Tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan pembiayaan *ijārah* untuk dana talangan Umroh pada PT. FIF Kotabumi (AMITRA). Peneliti akan menjelaskan tentang perhitungan pemberian Upah (*ujrah*) sesuai yang terjadi di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi. *Informan* ke-lima yaitu dengan Ibu Lili Mengatakan⁸⁷: “Beliau ingin melakukan ibadah umroh dengan menggunakan akad *Ijarah* di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi ini. Setelah melakukan registrasi dengan memberikan ketentuan dan syarat-syarat yang diberikan oleh PT. FIF Kotabumi”.

⁸⁷Ibu Lili (Nasabah), *Wawancara*, 17 Oktober 2018.

4. Ibu Lili ini memberikan uang muka yang telah ditentukan PT. FIF (AMITRA) sebesar Rp 5.000.000,-/orang. Ibu Lili berniat melakukan ibadah Umroh, biaya umroh yang telah ditetapkan dari PT. FIF (AMITRA) sebesar Rp25.000.000,-/orang.

Adapun mekanismenya:

Biaya umroh Rp25.000.000,-/orang,- Uang muka total Ibu Lili adalah Rp. 5.000.000,- Jadi kekurangan biaya Umroh $Rp\ 25.000.000 - Rp\ 5.000.000 = Rp\ 20.000.000,-$ /orang. Biaya *Qardh* yang harus dibayar oleh Ibu Lili adalah Rp.20.000.000 selanjutnya pihak PT. FIF (AMITRA) Telah menetapkan berapa besarnya upah berdasarkan *Ujrah* yang telah tertera pada brosur terhadap pelaksanaan Akad *Ijarah* tersebut, akhirnya kedua belah sepakat untuk memberikan *Ujrah* dari kekurangan biaya umroh tersebut. Dan nasabah telah sanggup untuk membayar cicilan kekurangan biaya umroh tersebut selama 1 *tahun ½(18 bulan)*.

Kekurangan biaya Umroh per orang Rp 20.000.000,-: 18 Bulan = Rp 1.394.000,-/bulan.

Jadi *ujrah* per orang: $Rp1.394.000. \times 18(\text{Bulan}) + Rp\ 5.000.000 = Rp30.092.000 - Rp\ 25.000.000 = \underline{\underline{Rp\ 5.092.000\ (Ujrah/orang)}}$.

Setelah itu, tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan pembiayaan *ijārah* untuk dana talangan Umroh pada PT. FIF Kotabumi (AMITRA). Peneliti akan menjelaskan tentang perhitungan pemberian Upah (*Ujrah*) sesuai yang terjadi di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi. Dengan

informan ke-enam yaitu dengan Bapak Sugianto beliau Mengatakan⁸⁸:
“Beliau ingin melakukan Ibadah umroh dengan menggunakan akad *Ijārah* di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi ini. Setelah melakukan registrasi dengan memberikan ketentuan dan syarat-syarat yang diberikan oleh PT.FIF Kotabumi”.

5. Bapak Sugianto memberikan uang muka yang telah ditentukan PT. FIF (AMITRA) oleh sebesar Rp 5.000.000,-/orang. Bapak Khaidir berniat melakukan ibadah Umroh, biaya umroh yang telah ditetapkan dari PT. FIF (AMITRA) sebesar Rp25.000.000,-/orang.

Adapun mekanismenya:

Biaya umroh Rp25.000.000,-/orang,- Uang muka total Bapak Sugianto adalah Rp. 5.000.000,- Jadi kekurangan biaya Umroh Rp 25.000.000– Rp 5.000.000 = Rp 20.000.000,-/orang. Biaya *Qardh* yang harus dibayaroleh Bapak Sugianto sebesar Rp. 20.000.000 selanjutnya pihak PT. FIF (AMITRA) Telah menetapkan berapa besarnya upah berdasarkan *ujrah* yang telah tertera pada brosur terhadap pelaksanaan Akad *ijārah* tersebut, akhirnya kedua belah sepakat untuk memberikan *ujrah* dari kekurangan biaya umroh tersebut. Dan nasabah telah sanggup untuk membayar cicilan kekurangan biaya umroh tersebut selama 3 tahun.

Kekurangan biaya Umroh per orang Rp 20.000.000,-: 36 bulan karena 3 tahun = Rp 850.000,-/bulan.

⁸⁸Bapak Sugianto (Nasabah), *Wawancara*, 23 Desember 2018

Jadi *ujrah* per orang: Rp 850.000x 36 (Bulan) + Rp 5.000.000=
Rp35.600.000– Rp 25.000.000= **Rp 10.600.000 (Ujrah/orang).**

Kemudian, setelah tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan pembiayaan *ijārah* untuk dana talangan Umroh pada PT. FIF Kotabumi (AMITRA).

Setelah itu, tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan pembiayaan *ijārah* untuk dana talangan Umroh pada PT. FIF Kotabumi (AMITRA).

Peneliti akan menjelaskan tentang perhitungan pemberian Upah (*Ujrah*) sesuai yang terjadi di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi.

Peneliti akan menjelaskan tentang perhitungan pemberian Upah (*Ujrah*) sesuai yang terjadi di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi. Dengan *informan* ke-tujuh yaitu dengan Ibu Boti beliau Mengatakan⁸⁹: “Beliau ingin melakukan Ibadah umroh dengan menggunakan akad *Ijārah* di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi ini. Setelah melakukan registrasi dengan memberikan ketentuan dan syarat-syarat yang diberikan oleh PT.FIF Kotabumi”.

6. Ibu Boti memberikan uang muka yang telah ditentukan PT. FIF (AMITRA) oleh sebesar Rp 7.500.000,-/orang. Ibu Boti berniat melakukan ibadah Umroh, biaya umroh yang telah ditetapkan dari PT. FIF (AMITRA) sebesar Rp25.000.000,-/orang.

Adapun mekanismenya:

⁸⁹Ibu Boti (Nasabah), Wawancara, 27 Desember 2018

Biaya umroh Rp25.000.000,-/orang,- Uang muka total Ibu Boti adalah Rp. 7.500.000,- Jadi kekurangan biaya Umroh Rp 25.000.000– Rp 7.500.000 = Rp 17.500.000,-/orang. Biaya *Qardh* yang harus dibayar oleh ibu Boti adalah Rp.17.500.000 selanjutnya pihak PT. FIF (AMITRA) Telah menetapkan berapa besarnya upah berdasarkan *ujrah* yang telah tertera pada brosur terhadap pelaksanaan Akad *ijārah* tersebut, akhirnya kedua belah sepakat untuk memberikan *ujrah* dari kekurangan biaya umroh tersebut. Dan nasabah telah sanggup untuk membayar cicilan kekurangan biaya umroh tersebut selama **1 Tahun.**

Kekurangan biaya Umroh per orang Rp 17.500.000,-: 12bulan karena 1 tahun = Rp 1.707.000,-/bulan.

Jadi *ujrah* per orang: Rp 1.707.000 x 12 (Bulan) + Rp 7.500.000= Rp27.984.000– Rp 25.000.000= **Rp 2.984.000 (Ujrah/orang).**

Kemudian, setelah tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan pembiayaan *ijārah* untuk dana talangan Umroh pada PT. FIF Kotabumi (AMITRA).

Setelah itu, tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan pembiayaan *ijārah* untuk dana talangan Umroh pada PT. FIF Kotabumi (AMITRA). Peneliti akan menjelaskan tentang perhitungan pemberian Upah (*Ujrah*) sesuai yang terjadi di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi. Dengan *informan* ke-delapan yaitu dengan Bapak Nasrun beliau Mengatakan⁹⁰: “Beliau ingin melakukan Ibadah umroh dengan menggunakan akad *Ijārah* di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi ini. Setelah melakukan

⁹⁰Bapak Nasrun (Nasabah), *Wawancara*, 28 Desember 2018

registrasi dengan memberikan ketentuan dan syarat-syarat yang diberikan oleh PT.FIF Kotabumi”.

7. Bapak Nasrun memberikan uang muka yang telah ditentukan PT. FIF (AMITRA) oleh sebesar Rp 7.500.000,-/orang. Bapak Nasrun berniat melakukan ibadah Umroh, biaya umroh yang telah ditetapkan dari PT. FIF (AMITRA) sebesar Rp25.000.000,-/orang.

Adapun mekanismenya:

Biaya umroh Rp25.000.000,-/orang,- Uang muka total Bapak Nasrun adalah Rp. 7.500.000,- Jadi kekurangan biaya Umroh Rp 25.000.000– Rp 7.500.000 = Rp 17.500.000,-/orang. Biaya *Qardh* yang harus dibayaroleh bapak Nasrun sebesar Rp.17.500.000 selanjutnya pihak PT. FIF (AMITRA) Telah menetapkan berapa besarnya upah berdasarkan *ujrah* yang telah tertera pada brosur terhadap pelaksanaan Akad *ijārah* tersebut, akhirnya kedua belah sepakat untuk memberikan *ujrah* dari kekurangan biaya umroh tersebut. Dan nasabah telah sanggup untuk membayar cicilan kekurangan biaya umroh tersebut selama **9 Bulan.**

Kekurangan biaya Umroh per orang Rp 17.500.000,-: 9bulan karena mengambil 9 bulan= Rp 2.196.000,-/bulan.

Jadi *ujrah* per orang: Rp 2.196.000x 9 (Bulan) + Rp 7.500.000= Rp27.264.000– Rp 25.000.000= **Rp 2.196.000 (Ujrah/orang).**

Kemudian, setelah tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan pembiayaan *ijārah* untuk dana talangan Umroh pada PT. FIF Kotabumi (AMITRA).

Setelah itu, tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan pembiayaan *ijārah* untuk dana talangan Umroh pada PT. FIF Kotabumi (AMITRA). Peneliti akan menjelaskan tentang perhitungan pemberian Upah (*Ujrah*) sesuai yang terjadi di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi. Dengan *informan* ke-sembilan yaitu dengan Bapak Herman beliau Mengatakan⁹¹:

“Beliau ingin melakukan ibadah umroh dengan menggunakan akad *Ijārah* di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi ini. Setelah melakukan registrasi dengan memberikan ketentuan dan syarat-syarat yang diberikan oleh PT.FIF Kotabumi”.

8. Bapak Herman memberikan uang muka yang telah ditentukan PT. FIF (AMITRA) oleh sebesar Rp 5.000.000,-/orang. Bapak Herman berniat melakukan ibadah Umroh, biaya umroh yang telah ditetapkan dari PT. FIF (AMITRA) sebesar Rp25.000.000,-/orang.

Adapun mekanismenya:

Biaya umroh Rp25.000.000,-/orang,- Uang muka total Bapak Herman adalah Rp. 5.000.000,- Jadi kekurangan biaya Umroh $Rp\ 25.000.000 - Rp\ 5.000.000 = Rp\ 20.000.000,-/orang$. Biaya *Qardh* yang harus dibayar oleh Bapak Herman sebesar Rp.20.000.000 selanjutnya pihak PT. FIF (AMITRA) Telah menetapkan berapa besarnya upah berdasarkan *ujrah* yang telah tertera pada brosur terhadap pelaksanaan Akad *ijārah* tersebut, akhirnya kedua belah sepakat untuk memberikan *ujrah* dari kekurangan

⁹¹Bapak Herman (Nasabah), *Wawancara*, 1 Januari 2019

biaya umroh tersebut. Dan nasabah telah sanggup untuk membayar cicilan kekurangan biaya umroh tersebut selama **3 tahun.**

Kekurangan biaya Umroh per orang Rp 20.000.000,-: 36 bulan karena 3 tahun = Rp 850.000,-/bulan.

Jadi *ujrah* per orang: Rp 850.000x 36 (Bulan) + Rp 5.000.000= Rp35.600.000– Rp 25.000.000= **Rp 10.600.000 (Ujrah/orang).**

Kemudian, setelah tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan pembiayaan *ijārah* untuk dana talangan Umroh pada PT. FIF Kotabumi (AMITRA). Peneliti akan menjelaskan tentang perhitungan pemberian Upah (*ujrah*) sesuai yang terjadi di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi. *Informan ke-sepuluh* yaitu dengan Ibu Sumiati Mengatakan⁹²: “Beliau ingin melakukan ibadah umroh dengan menggunakan akad *ijārah* di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi ini. Setelah melakukan registrasi dengan memberikan ketentuan dan syarat-syarat yang diberikan oleh PT. FIF Kotabumi”.

9. Ibu Sumiati ini memberikan uang muka yang telah ditentukan PT. FIF (AMITRA) oleh sebesar Rp 5.000.000,-/orang,. Ibu Sumiati berniat melakukan ibadah Umroh, biaya umroh yang telah ditetapkan dari PT. FIF (AMITRA) sebesar Rp25.000.000,-/orang.

Mekanismenya:

Biaya umroh Rp25.000.000,-/orang,- Uang muka total Ibu Sumiati adalah Rp. 5.000.000,- Jadi kekurangan biaya Umroh Rp 25.000.000–

⁹²Ibu Sumiati (Nasabah), Wawancara, 3 Januari 2019.

Rp 5.000.000 = Rp 20.000.000,-/orang. Biaya *Qardh* yang harus dibayar oleh Ibu Sumiati sebesar Rp.20.000.000 selanjutnya pihak PT. FIF (AMITRA) telah menetapkan berapa besarnya upah berdasarkan *Ujrah* yang telah tertera pada brosur terhadap pelaksanaan Akad *Ijārah* tersebut, akhirnya kedua belah sepakat untuk memberikan *Ujrah* dari kekurangan biaya umroh tersebut. Dan nasabah telah sanggup untuk membayar cicilan kekurangan biaya umroh tersebut selama **3 tahun.**

Kekurangan biaya Umroh per orang Rp 20.000.000,-: 36 bulan karena 3 tahun = Rp 850.000,-/bulan.

Jadi *ujrah* per orang: Rp 850.000 x 36(Bulan) + Rp 5.000.000= Rp35.600.000– Rp 25.000.000= **Rp 10.600.000 (Ujrah/orang).**

Menurut penuturan para nasabah yang telah di wawancarai ada yang menyatakan keberatan atas *ujrah* yang telah ditetapkan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu, tetapi hanya PT. FIF (AMITRA) sajalah yang mampu memberangkatkan para nasabah ke Tanah Suci untuk Beribadah tanpa harus melunasi terlebih dahulu biaya yang sudah disepakati. Selain itu, menurut penuturan para nasabah PT. FIF (AMITRA) ini sangat cepat dan mempermudah nasabah dalam memproses dokumen baik paspor maupun keperluan yang lainnya sehingga PT. FIF (AMITRA) termasuk kedalam biro perjalanan umroh yang cepat dalam memberangkatkan para nasabahnya serta telah memiliki Platform Syariah dari Dewan Pengawas Syariah yang dimana .

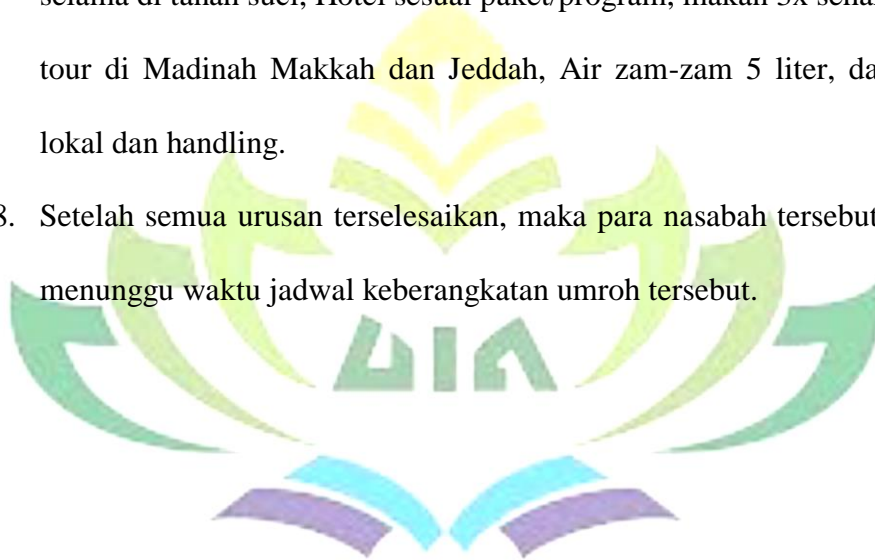
Kemudian, tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan pembiayaan *ijārah* untuk dana talangan Umroh pada PT. FIF Kotabumi (AMITRA) Peneliti akan menjelaskan tentang perhitungan pemberian Upah (*ujrah*) sesuai yang terjadi di PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti Pelaksanaan Akad *ijārah* adalah sebagai berikut:

1. Para nasabah melihat brosur yang isinya tentang dana talangan umroh dengan menggunakan Akad *ijārah*.
2. Kemudian para nasabah tersebut mendatangi PT. FIF (AMITRA) Cabang Kotabumi dan menanyakan bagaimana cara untuk ikut talangan umroh tersebut.
3. PT. FIF (AMITRA) Cabang Kotabumi menjelaskan kepada Nasabah dan memberitahukan apa saja syarat dan ketentuannya.
4. Setelah syarat dan ketentuan terpenuhi, Para Nasabah melakukan pembayaran uang muka kepada pihak PT. FIF (AMITRA) Cabang Kotabumi. Para Nasabah memberikan Uang Muka.
5. Setelah itu, PT. FIF (AMITRA) Cabang Kotabumi yang menentukan, menghitung dan menjelaskan kekurangan biaya umroh yang harus dibayar oleh para nasabah, karena mereka ingin melakukan sisa pembayaran selama berapa tahun yang mereka sepakati.
6. Setelah para nasabah lainnya menyetujui perhitungan pembayaran kekurangan biaya umroh maka dilanjutkan membuat paspor ke kantor imigrasi dan ditemani oleh pihak PT. FIF (AMITRA) Cabang

Kotabumi, dan biaya pembuatan paspor ditanggung oleh para nasabah sendiri kemudian dilanjutkan dengan cek kesehatan serta suntik meningitis sebelum pemberangkatan umroh.

7. Sebelum pemberangkatan para Nasabah lainnya mendapatkan fasilitas seperti, bimbingan manasik di tanah air dan tanah suci, pembimbing atau tour leader, perlengkapan (koper, tas kecil, seragam, kain ihram/mukena dan bergo, syal, buku do'a dan buku panduan, ID Card/kartu pengenalan), visa umroh, tiket pesawat pulang pergi, bis AC selama di tanah suci, Hotel sesuai paket/program, makan 3x sehari. City tour di Madinah Makkah dan Jeddah, Air zam-zam 5 liter, dan tiket lokal dan handling.
8. Setelah semua urusan terselesaikan, maka para nasabah tersebut hanya menunggu waktu jadwal keberangkatan umroh tersebut.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktik Akad Talangan Pembiayaan Umroh Melalui Jasa Keuangan PT. FIF Kotabumi

Pada produk dari PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi yaitu *Qardh Wal Ijarah* untuk dana talangan umroh. Ketika ada calon anggota yang ingin mengikuti pelaksanaan akad *qardh wal ijarah* tersebut, pihak PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi akan menjelaskan bagaimana syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon anggota.

Setelah anggota mengetahui syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi, anggota harus menyerahkan syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk mengikuti akad *qardh wal ijarah* tersebut. Setelah semua syarat dan ketentuan telah dipenuhi oleh calon anggota Umroh, maka anggota wajib membayar uang muka sebesar yang ingin diberikan kepada pihak PT. FIF (AMITRA) dan disini mayoritas nasabah memberikan uang muka sebesar Rp5.000.000,-/orangserta membayar *ujrah* yang telah ditetapkan oleh pihak PT. FIF (AMITRA).

Setelah membayar uang muka, pihak PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi akan menanyakan kepada anggota berapa jangka waktu yang diinginkan anggota untuk melunasi biaya umroh tersebut dan menjelaskan bagaimana cara membayar biaya kekurangan umroh tersebut pihak PT. FIF (AMITRA) para nasabah apabila biaya kekurangan *qardh* tidak harus dilunasi dengan waktu yang telah disepakati namun jika para nasabah ingin berangkat umroh dapat dijadwalkan, tetapi ditekankan nantinya jamaah atau para

nasabah setelah pulang dari ibadah umroh harus menyelesaikan pembayaran pinjaman yang waktu pelunasan telah disepakati dalam akad *qardh* (pinjaman) yang telah dilakukan oleh nasabah/jama'ah ibadah umroh.. Karena menggunakan akad *qardh wal ijārah* maka pihak PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi berhak untuk mendapatkan *ujrah* atau imbalan dari fasilitas-fasilitas yang akan PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi berikan kepada anggota keterkaitannya dengan pelaksanaan umroh. *Ujrah* yang ditetapkan PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi sesuai dengan fasilitas-fasilitas yang telah PT. FIF (AMITRA) diberikan kepada anggota.

Setelah anggota menyetujui tentang biaya yang harus dibayarkan, maka akan diproses pelaksanaan umroh tersebut. Anggota umroh akan diantarkan oleh pihak PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi ke balai imigrasi untuk melakukan pembuatan paspor, dan untuk biaya pembuatan paspor ditanggung oleh anggota umroh. Setelah urusan tersebut selesai akan dilanjutkan untuk melakukan cek kesehatan dan suntik meningitis sebelum pemberangkatan umroh. paspor, dan untuk biaya pembuatan paspor ditanggung oleh anggota umrah karena pada awal akad pihak PT. FIF (AMITRA) cabang Kotabumi telah menjelaskan apa apa saja yang fasilitas yang diberikan kepada nasabah dari PT. FIF (AMITRA) yaitu kecuali pembuatan paspor dan suntik meningitis tersebut ditanggung oleh para nasabah.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat simpulkan bahwa praktik akad talangan pembiayaan umroh melalui jasa keuangan PT. FIF Kotabumi tentang dana talangan umroh dengan menggunakan akad *Qardh Wal Ijārah*.

Dalam pelaksanaannya praktik pembiayaan talangan umroh di PT. FIF (AMITRA) mendapatkan keuntungan *ujrah* dengan melihat jangka waktu pelunasan nasabah bukan mendapatkan dari upah/jasa administrasi yang diberikan PT. FIF kepada para nasabah.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Talangan Pembiayaan Umroh Melalui Jasa Keuangan PT. FIF Kotabumi

Dalam pelaksanaan obyek talangan biaya umroh pada jasa keuangan (FIF) di Kotabumi menunjukkan adanya dua unsur yang tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam yaitu:

Terdapat penambahan uang didalam akad *Qardh Wal Ij'arah* yang mengandung unsur *riba*. Bahwa *riba* adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam, hal ini dikarenakan makna *riba* sendiri adalah tambahan atau (*Ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, yang dikenal dengan istilah *riba nasi'ah*. Atau dapat dikatakan suatu keuntungan moneter tanpa ada nilai imbalan yang ditetapkan untuk salah satu dari dua pihak yang mengadakan kontrak dalam pertukaran dua nilai moneter.⁹³ Dalam besarnya keuntungan tergantung pada uang muka (*Down Payment*) dan lamanya masa pelunasan (masa angsuran) yang ditetapkan oleh pihak PT. FIF cabang Kotabumi. Dalam hal ini sebenarnya angsuran atau cicilan yang diambil oleh jamaah umroh memang kecil (terjangkau), akan tetapi apa bila kita kalikan berapa lama waktu yang

⁹³Abdul Qadir Jaelani, "Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)", *Jurnal Asas*, Vol IV, No 02, 14 Juli 2012, h 2.

diambil dalam mencicil uang tersebut *ujrah* yang di dapat pihak pembiyaan bisa mencapai 30-40 persen dari keuntungan.

Hasil dari keuntungan yang telah didapat dari pelunasan dan besarnya *ujrah*, akan dilimpahkan untuk pembiayaan talangan umroh bagi calon nasabah yang baru yang sebagaimana biasa dilakukan oleh talangan pembiayaan konvensional pada umumnya.

.Berdasarkan Firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

(ال مائدة)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.* (Q.S Al-Maidah: 1)⁹⁴

Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Akad ini disebutkan secara umum. Tidak menunjukan akad tertentu. Artinya secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah, lalu setiap mukmin wajib untuk memenuhi akad-akad tersebut. Termasuk jual beli, sewa-menyewa dan nikah. Serta segala yang termasuk kedalam kategori akad jika terdapat perbedaan mengenai boleh tidaknya suatu akad, sah dan berlakunya suatu *nadzar*. Ayat diatas dapat dijadikan suatu dalil karena keumumannya tersebut menunjukan kebolehan segala bentuk

⁹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), hlm

akad, termasuk akad pinjam-meminjam (*kafālah*), sewa-menyewa/upah, jual-beli, dan sebagainya

Dalam bermuamalah dalam Islam sudah terdapat firman Allah SWT yang berbunyi:

عَلَّمَ الرَّبُّ وَأَوْحَرَ مَالَهُ وَأَحَلَّ (الْبَاقِرَةُ)

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba* (Q.S. Al-Baqarah: 275)⁹⁵

Dari penjelasan di atas bahwa pandangan hukum Islam tentang akad talangan pembiayaan umroh melalui jasa keuangan PT. FIF Kotabumi menggunakan akad *Qardh Wal Ijārah* dilihat dari pelaksanaan akad tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN No: 29/DSN-MUI/VI/2002 yang dimana besar imbalan jasa *al-ijārah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* atau ketentuan hukum Islam rentan mengandung unsur *riba*.

⁹⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid & Terjemah* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik akad talangan pembiayaan umroh melalui jasa keuangan PT. FIF Kotabumi tentang dana talangan umroh dengan menggunakan akad *Qardh Wal Ijārah*. Dalam pelaksanaannya praktik pembiayaan talangan umroh di PT. FIF (AMITRA) mendapatkan keuntungan *ujrah* dengan melihat jangka waktu pelunasan nasabah bukan mendapatkan hasil keuntungan dari upah/jasa administrasi yang diberikan PT. FIF kepada para nasabah.
2. Pandangan hukum Islam tentang akad talangan pembiayaan umroh melalui jasa keuangan PT. FIF Kotabumi menggunakan akad *Qardh Wal Ijārah* dilihat dari pelaksanaan akad belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN No: 29/DSN-MUI/VI/2002 yang dimana besar imbalan jasa *al-ijārah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *Al-Qardh* atau ketentuan hukum Islam rentan mengandung unsur *riba*.

B. SARAN

1. PT. FIF perlu memberikan kejelasan akad yang digunakan untuk produk dana talangan umroh, dan memberikan kejelasan kepada nasabah/masyarakat untuk *ujrah* yang telah ditentukan dan sejatinya dilakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum melaksanakan *Ijab* dan *Qobul*.

2. Sebaiknya PT. FIF kotabumi dalam pemberangkatan jamaah umroh para nasabah diwajibkan melunasi terlebih dahulu sisa tanggungannya, agar setelah nasabah pulang dari Ibadah umroh tidak ada beban dalam pelunasan.
3. Kepada insan akademik sedianya penelitian ini dapat memberikan rujukan awal atau sementara, yang kemudian dikembangkan penelitian yang lebih mendalam sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengembang ilmu ekonomi syari'ah.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Solihin, As Suhaili. *Kitab Super Lengkap Tuntunan Haji dan Umroh*. Jakarta: Cahaya Ilmu. 2015.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditia Bakti. 2004.
- Al Munawar, Said Agil Husin, dan Abdul Halim. *Fikih Haji menuntun Jamaah Mencapai Haji Mabrur*, Jakarta, Ciputat Press. 2003.
- Al-Hasyimi, Sayyid Ahmad. *Syarah Mukhtaarul Ahaadiist*, Bandung, Sinar Baru. 1993.
- Anshori, Ghofur Abdul. *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2017.
- Antonio, Syafii Muhammad. *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media. 2005.
- Dimyauddin, Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani. "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Indonesia", *'Al-Adalah*, Vol. XII, No. 04. Desember 2015, (On-line) tersedia di :
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214>. (10 Januari 2019)
- Fatwa DSN-MUI, no. 09/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Ijarah Ghofur*, Ruslan Abdul. "Kontruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia". *'Al-Adalah*. Vol. XII, No. 3. Juni 2015.

<https://www.astra.co.id/Business/Financial-Services/Motorcycle-Financing/FIFGROUP> (26 Oktober 2018)

Ika Setiana, *Analisis Penerapan Akad Qard Wal Ijarah Pada Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*, *Jurnal Raushan Fikr*, Vol. 4 No.2, Juli 2014

Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan IAIN Raden Intan. 2005.

Jaelani, Abdul Qadir. "Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)". *Asas*. Vol. IV. No. 02. 14 Juli 2012

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet VII. Bandung : CV. Mandar Maju. 1996.

Moleong, J Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2010.

Muhammad Maksum. "Model-Model Kontrak dalam Produk Keuangan Syariah", *'Al-Adalah*. Vol. XII, No. 1. Juni 2014, (online) tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203>.

Muhammad Zuhaily. *Fiqh Empat Mazhab Jilid IV*. Jakarta: Gema Insani. 2010.

Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2009.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.

Rochimi, H. Bdurachman. *Segala tentang Haji dan Umroh*, Jakarta, Erlangga. 2009.

Rozalinda. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah* Padang: Hayfa Press. 2005.

Sahari, Sohari. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

- Said Agil Husin Al-Munawar. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani. 2005.
- Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir. No. 6779, Al-Misykaah No. 2915, Sunan at-Tirmidzi (II/270, No.1084).
- Subekti, Tjitosudibio. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2007.
- Sudarsono, Heri. *Istilah Istilah Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Djambatan. 2004.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta. 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Syafe'i, Rachmad. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Taqyuddin An-Nabhani. *Membangun system ekonomi alternative persepektif islam*. Surabaya: Risalah gustu. 1996.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1998.
- WJS. Poerwadarminto. *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka. 1976.